

BAB III

PERSEPSI PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

Pada bagian pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan metode penelitian yang telah dilaksanakan yakni dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan kuesioner.

Berdasarkan kerangka teori dan definisi operasional yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya pada penelitian ini, bahwa ada beberapa indikator-indikator yang menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan dibahas pada bab ini. Adapun indikator pada dependen variabel dari Pengelolaan Keuangan Desa adalah : 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Sedangkan indikator pada independen variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah : 1) Sumber Daya Manusia, 2) Informasi 3) Partisipasi Masyarakat. Berikut adalah pembahasan dari indikator-indikator diatas terkait Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2017).

1. Pengelolaan Keuangan Desa Ngargomulyo

Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan desa, peran serta pemerintah desa akan menentukan kearah mana keuangan desa akan dialokasikan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 6 telah diatur mekanisme pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dari itu penulis akan membahas satu persatu tahapan yang sesuai peraturan yang berlaku.

Desa Ngargomulyo merupakan desa yang tergolong dalam desa Swakarya dimana desa ini memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kelebihan dari hasil sumber daya alam yang dimiliki Desa Ngargomulyo telah dipasarkan ke luar daerah seperti misalnya hasil pertanian, cabai, sayur mayur dan lain sebagainya. Berdasarkan ciri ciri tersebut seseuai dengan teori desa yang di ungkapkan oleh Sriarta bahwa desa swakarya mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri.

a. Perencanaan

Dalam proses pengelolaan keuangan desa langkah awal menentukan arahnya adalah dengan merencanakan terlebih dahulu. Meskipun dalam proses perencanaan melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah desa memiliki wewenang menentukan prioritas penggunaan anggaran terhadap program yang ditetapkan. Pada tahap perencanaan kebijakan pemerintah Desa Ngargomulyo tahun 2016-2017 tidak jauh berbeda, semua menghadirkan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda dan juga tentunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam proses perencanaan kepala desa

dibantu oleh Tim Pendamping Desa serta dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa.

Kepala desa Ngargomulyo Bapak Yatin juga menyatakan bahwa proses perencanaan di ikuti oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Ngargomulyo sangat antusias.

“Bapak Yatin mengatakan secara langsung saat wawanacara, jadi mekanismenya seperti ini mas, bahwa sebelum adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Setiap dusun harus melakukan musyawarah ditingkat dusun (Musdus) terlebih dahulu. Tujuannya supaya aspirasi dari masyarakat dapat terserap secara merata bukan hanya langsung musrembangdes dan aspirasinya bertumpuan pada Kelapa Dusun, RT, RW, Tokoh Masyarakat. Dalam musyawarah dusun itulah warga dapat mengutarakan apa yang ingin ia usulkan dalam menunjang kemajuan desa. Langkah berikutnya baru ke Musrembangdes dimana dalam musyawarah ini pemerintah desa Ngargomulyo melibatkan semua unsur masyarakat dari perwakilan pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tak luput juga dari perwakilan perempuan, perangkat desa juga tentunya terlibat dalam musrembangdes mereka juga bisa berpartisipasi menyampaikan ide, gagasan mereka”

Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan pemerintah desa telah membuka kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk mencapai pembangunan desa yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Saryadi selaku ketua kelompok tani Ngudimakmur dalam wawanaca langsung di Rumahnya di dusun Ngandong.

“Pemerintah desa Ngargomulyo memang selalu melibatkan semua unsur masyarakat termasuk saya yang selalu ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Saya selaku perwakilan dari kelompok tani selalu memberikan gagasan tentang permasalahan pertanian tentunya, misalnya pembuatan irigasi perairan sawah warga”

Mekanisme pengelolaan keuangan desa diawali dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, Kepala Desa mengajak semua pihak untuk mengadakan musyawarah desa untuk merencanakan penggunaan keuangan desa. Hasil dari musyawarah bersama masyarakat, Badan Perumasyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan lainnya kemudian akan di cantumkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Ngargomulyo Bapak Yatin, dalam wawancara langsung dengan beliau, bahwa dijelaskan dengan tegas keuangan desa yang dikelola hanya di peruntuhkan pada 4 bidang saja, antara lain bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Selain pada itu pemerintah Desa Ngargomulyo tidak berani menganggarkan karena keuangan desa ini juga dari rakyat dan akan kembali dinikmati oleh masyarakat. Penyusunan anggarannya juga dilakukan dengan tim pendamping desa bukan dilakukan secara mandiri karena desa juga butuh pembimbing agar dalam penyusunan dapat tepat tanpa adanya surplus/defisit anggaran”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan penggunaan keuangan Desa Ngargomulyo telah dijalankan dengan cukup baik dan telah berdasarkan pada 4 (empat) aspek bidang kewenangan desa yang telah ditetapkan. Dalam proses perencanaan ini Pemerintah Desa Ngargomulyo dibantu langsung oleh Tim Pendamping Desa, tujuannya apabila terdapat kendala dalam proses perencanaan Tim Pendamping Desa dapat memberikan solusi terbaik.

Pada tahap penyusunan rancangan yang harus dilakukan meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDes) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan Desa Ngargomulyo. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pemerintah Desa wajib melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) secara terbuka.

Selanjutnya setelah musyawarah perencanaan pembangunan maka dihasilkanlah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di Desa Ngargomulyo sendiri proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) telah berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Adapun Rencana Pembangunan Desa di Desa Ngargomulyo tahun 2016-2017 yang meliputi 4 (empat) bidang,. Dibawah ini merupakan Tabel Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngargomulyo Tahun 2016-2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngargomulyo Tahun 2016

No	Rencana Kerja Pembangunan Kerja
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
	2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	3. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	4. Tunjangan BPD
	5. Tunjangan Penjaga Kantor Desa
	6. Tunjangan Pembantu Administrasi Umum
	7. Premi BPJS Ketenagakerjaan
	8. Tunjangan Sekdes PNS
	9. Purna bhakti Perangkat Desa yang diberhentikan
	10. Pengadaan ATK Desa
	11. Pengadaan Benda pos desa
	12. Biaya Rapat Desa
	13. Alat dan bahan kebersihan
	14. Perjalanan Dinas
	15. Pemeliharaan perawatan kantor
	16. Pemeliharaan kendaraan dinas
	17. Tagihan listrik
	18. Tagihan Jaringan Internet
	19. Pengadaan alat listrik
	20. Honor PTPKD
	21. Pengadaan Meja Pelayanan Publik
	22. Oprasional BPD
	23. Penyusunan LKPPD dan LPPD
	24. Penyusunan RAPBDes
	25. Penyelenggaraan Rapat Musrenbangdes
	26. Penyelenggaraan Rapat Penyampaian LKPJ
	27. Pengadaan Tapal Batas Desa
	28. Pengisian Perangkat Desa
	29. Keg. Intensifikasi PBB Tim Pemunggut PBB
	30. Kegiatan Sosialisasi PBB dan Pembagian SPPT tingkat dusun
B	Bidang Pembangunan Desa
	1. Rehap atap Gedung PKD
	2. Pembagunan talud jalan Braman-Gemer
	3. Pembagunan Talud Jalan Dsn. Ngandong
	4. Pembagunan Jembatan Blongkeng Dsn. Batur Duwur
	5. Pembagunan DAM parit Dsn. Sabrang
	6. Pembagunan jalan usaha tani Kebon - Pusung telo Dsn. Sabrang
	7. Pembagunan drainase Dsn. Braman

No	Rencana Kerja Pembangunan Kerja
	8. Pembangunan Sangar Seni Dusun Karanganyar
	9. Pembagunan jalan usaha tani Dusun Batur Ngisor
	10. Pembagunan Talud jalan dusun Tanen Rt. 1
	11. Pembangunan Sarana Penyuluhan Pertanian Dusun Tanen Rt. 2
	12. Pembagunan Talud Jalan dan Gorong-gorong Dsn. Bojong
	13. Pembagunan Jalan Gang Dsn. Bojong
	14. Pembagunan cor blok jalan gang Dsn. Tangkil
C	Pembinaan Kemasyarakatan
	1. Keg. Pembinaan kerukunan umat beragama
	2. Pengadaan alat elektronika Sound sistem Desa
	3. Kegiatan Pembinaan Remaja/Karang Taruna
	4. Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Remaja
	5. Pembinaan kesenian Tradisional se-Desa Ngargomulyo
	6. Pembinaan kreatifitas dan Prestasi anak Se-Desa Ngargomulyo
	7. Pembinaan kemasyarakatan bidang keagamaan dusun Kembang
	8. Pengadaan Seragam Perangkat Adat Jawa
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1. Pelatihan SDM Kades, Perangkat Desa dan LPMD
	2. Pengadaan Printer Desa
	3. Pengadaan komputer PC
	4. Pengadaan jaringan internet
	5. Pengadaan Camera Lensa Digital
	6. Peningkatan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah
	7. Pelatihan Komputer BPD
	8. Pengadaan Laptop BPD
	9. Pelatihan dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah
	10. Keg. Pelestarian Lingkungan Hidup
	11. Pelatihan Penyusunan Profil Desa (Prodeskel)
	12. Pelatihan Penyusunan dan Pembuatan RPJMDes
	13. Kegiatan peningkatan pendidikan TK pertiwi
	14. Kegiatan peningkatan pendidikan TK Kuncup Mekar
	15. Kegiatan peningkatan pendidikan TK ABA Guppi
	16. Kegiatan peningkatan pendidikan PAUD
	17. Pelatihan Bimbingan Teknis Ketua RT
	18. Kegiatan Peningkatan peran LPMD
	19. Kegiatan Oprasional KPMD
	20. Kegiatan Peningkatan peran Linmas
	21. Kegiatran Peningkatan peran PPKBD

No	Rencana Kerja Pembangunan Kerja
	22. Kegiatan peningkatan Peran Gapoktan
	23. Kegiatan Peningkatan peran posyandu balita
	24. Kegiatan peningkatan peran posyandu lansia
	25. Kegiatan peningkatan peran posyandu bumil
	26. Kegiatan Peningkatan Peran FPRB
	27. Pelatihan Kearsipan
	28. Kegiatan Peningkatan Peran PKK
	29. Kegiatan peningkatan peran masyarakat HUT RI
	30. Kegiatan Peningkatan Peran Kelompok Tani

(Sumber : RKPDes Ngargomulyo Tahun 2017)

Kemudian Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017 Desa Ngargomulyo meliputi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngargomulyo Tahun 2017

No	Rencana Kerja Pembangunan Kerja
A	Penyelenggara Pemerintah Desa
	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
	2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	3. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	4. Tunjangan BPD
	5. Tunjangan Perangkat desa di luar SOTK Pemerintah Desa
	- Tunjangan Penjaga Kantor Desa
	- Tunjangan Pembantu Administrasi Umum
	- Tunjangan RT
	6. Premi BBJK Ketenagakerjaan
	7. Purna bhakti bagi Perangkat Desa yang diberhentikan
	8. Pengadaan ATK Desa
	9. Pengadaan Benda pos desa
	10. Biaya Rapat
	11. Alat dan Bahan Kebersihan
	12. Perjalanan Dinas
	13. Pemeliharaan perawatan kantor (Korden, Pengecatan)
	14. Pemeliharaan peralatan kantor
	15. Pemeliharaan kendaraan dinas

No	Rencana Kerja Pembangunan Kerja
	16. Tagihan listrik
	17. Tagihan Jaringan Internet
	18. Tagihan Air Bersih
	19. Pengadaan alat listrik
	20. Biaya sewa gudang peralatan Desa
	21. Honor PTPKD
	22. Oprasional BPD
	23. Penyusunan LKPPD dan LPPD
	24. Penyusunan RAPBDes
	25. Penyelenggaraan Rapat Musrenbangdes
	26. Penyelenggaraan Rapat Penyampaian LKPJ
	27. Pengisian perangkat Desa
	28. Pengadaan Meja, Kursi Rapat dan Kursi kerja
	29. Pengadaan meja pelayanan publik
	30. Pengadaan pendingin ruangan Aula Balai Desa
	31. Pembelian stand mic
	32. Pembelian mic kabel
	33. Pengadaan Printer
	34. Pengadaan Scanner
	35. Pembayaran Pajak PBB tanah Ex. Sekdes
	36. Keg. Jemput Bola Tim Pemungut PBB tingkat Dusun
	37. Penghargaan Pemungutan PBB dusun
	38. Dana Tak Terduga
B	Bidang Pembangunan Desa
	1. Pembangunan pengapalan jalan evakuasi Tangkil-Karangayar
	2. Pembangunan Cor Blok Gang Dusun Gemer
	3. Perbaikan Jalan Jalur Evakuasi Tanen RT. 02 - Batur Ngisor
	4. Pembangunan Rehab Gedung PKD
	5. Pembangunan gudang Desa
	6. Pembangunan Rehab WC Kantor Desa
C	Pembinaan Kemasyarakatan
	1. Kegiatan jelajah alam Forum Anak
	2. Kegiatan BKR Undang-undang Pornografi
	3. Kegiatan Pembinaan Tantib Perangkat Desa
	- Pengadaan sragam batik perangkat desa
D	Pembaerdayaan Masyarakat

No	Rencana Kerja Pembangunan Kerja
	1. Pelatihan peningkatan SDM BPD, Perangkat Desa
	2. Pelatihan Pengoprasian program SID
	3. Kegiatan peningkatan peran masyarakat HUT RI / Perlombaan Desa
	4. Program PKK
	- Pelatihan Komputer PKK
	- Pelatihan Seni Tari Lagu dan Gerak TK pertiwi
	- Pelatihan Seni Tari Lagu dan Gerak TK Kuncup Mekar
	- Pelatihan Seni Tari Lagu dan Gerak TK ABA Guppi
	- Pelatihan menari untuk anak PAUD
No	Rencana Kerja Pembangunan Kerja
	- Pelatihan pengolahan sampah dan Lingkungan Hidup
	- Pelatihan Pembuatan PMT Balita
	- Pelatihan Senam Lansia
	- Pelatihan Perawatan Bayi untuk Bumil
	5. Program LPMD
	- Bintek Admistrasi LPMD
	- Pelatihan Gladi Posko Relawan Desa / FPRB
	6. Kegiatan Oprasional KPMD
	7. Pelatihan peningkatan Kapasitas Kaposkampling Linmas
	8. Pelatihan Kader PPKBD

(Sumber : RKPDes Ngargomulyo Tahun 2017)

Dalam wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan sekretaris Desa Ngargomulyo Bapak M. Muji beliau menyampaikan hambatannya dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa.

“Ya. Tentu semuanya ada kendalanya termasuk dalam penyusunan RKP. Pemerintah desa ingin seperti ini nantinya tapi kembali lagi kebutuhan masyarakat. Namun dalam hal ini pemerintah desa mengambil jalan tengah dari hambatan tersebut yaitu dengan mempertimbangkan yang lebih *urgent* dari usulan usulan yang ada. Terkait penyusunan anggaran biasanya ya hambatannya adalah kurang rasa percayanya masyarakat, istilahnya mereka takut uang desa dikorupsi tapi sejauh ini kita transparan dalam penyusunan anggran kita adakan secara terbuka biar semuanya gamblang kita ajak semua pihak untuk berpartisipasi. Ujar Sekretaris Desa Ngargomulyo saat diwawancara”

Meilihat uraian diatas bahwa proses perencanaan atau penyusunan program pembangunan kerja pemerintah telah baik, masyarakat mau terlibat dalam proses penyusunan, sehingga program yang dicanangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, meskipun aspirasi mereka tidak semua diterima karena harus memprioritaskan yang terpenting terdahulu. Namun dalam tahapan ini partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Secara tidak langsung dengan memperhatikan RKPDes diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Ngargomulyo melakukan perencanaan yang berkeadilan.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini pemerintah desa memberikan anggaran yang dibutuhkan kepada masing masing tim pelaksana desa agar transparansi dan penyampaian informasi tepat pada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini pemerintah desa Ngargomulyo membagi anggaran atas 4 (empat) bidang yaitu : Bidang penyelenggara pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat.

Hal ini juga terlihat dari RKPDes tahun 2017 dalam pemberdayaan masyarakat terdapat pelatihan pengolahan sampah yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini didukung dengan munculnya Komunitas Gong Merapi, yang memiliki tujuan mengolah sampah dengan meningkatkan harga jual sampah yang telah diolah dalam bentuk kerajinan .

Pelaksanaan pembangunan di Desa Ngargomulyo melibatkan masyarakat umum dalam pelaksanaannya dan pengawasannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widodo selaku Kaur Pembangunan Desa Ngargomulyo.

“Pada tahapan pelaksanaan pemerintah desa telah melibatkan masyarakat sebagai pelaksana dalam hal ini ada masyarakat yang berpartisipasi sebagai tukang, sebagai kuli bangunan kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada didesa. Masyarakat berpartisipasi dalam bentuk gotong royong ataupun sebagai pekerja. Dengan menggunakan jasa masyarakat sebagai tukang,kuli dan lain sebagainya kita juga telah mengangkat perekonomian masyarakat dan juga masyarakat agar tau secara langsung proses pelaksanaannya. Ujar widodo saat wawancara langsung di kantor desa Ngargomulyo”

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahawa dalam tahap ini pemerintah Desa Ngargomulyo melaksanakan asas pengelolaan desa yaitu terkait dengan partisipatif terhadap masyarakat. Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat bukan hanya dalam perencanaan saja namun dalam pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat. Seperti yang telah penulis sampaikan dalam kerangka teori bahwa ada beberapa asas yang harus di penuhi oleh pemerintah desa salah satunya adalah asas partisipasi masyarakat. Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan penelitian di Desa Ngargomulyo sedang dilakukan renovasi gedung milik pemerintah desa, terlihat partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong sangat terlihat jelas. Selain itu Badan Perumyaratan Desa ikut serta dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim pelaksana kegiatan dalam bentuk pengawasan secara langsung beserta masyarakat umum. Hal ini disamapaikan oleh Bapak Istiyo selaku anggota BPD Desa Ngargomulyo pada wawanacara langsung di kantor Desa Ngargomulyo :

“ Tentunya Peran Badan Permusyaratan Desa selain ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai pengawas semua kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pada akhir kegiatan BPD berhak atas laporan kegiatan selama satu tahu anggaran yang telah dilaksanakan. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat antusias sekali saya juga senang apabila masyarakat juga ikut terlibat dalam

proses pembangunan mereka bisa sebagai pekerja dan juga sebagai pengawas secara tidak langsung” begitu tutur Bapak Istiyo yang merupakan anggota BPD delegasi Dusun Ngandong dalam wawancara langsung di kantor Desa Ngargomulyo

Dalam tahu anggaran 2016 terdapat sisa anggran yang di miliki desa Ngargomulyo merupakan bukan berasal dari Dana Desa, namun dari keuangan yang memiliki sumber yang sah sehingga dapat dimasukkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Adanya silpa tahun 2016 merupakan sebab dari tidak berjalannya program yang di rencanakan oleh pemerintah desa sehingga program tersebut di masukkan kembali pada anggaran tahun berikutnya.

Adapun rincian biaya yang dihabiskan pemerintah Ngargomulyo yang digunakan sebagai pelaksanaan program yang telah pemerintah Desa canangkan, berikut rincian penggunaan keuangan Desa Ngargomulyo Tahun 2016-2017:

Tabel 3.3
Penggunaan Keuangan Desa Ngargomulyo Tahun 2016

No	Tim Pelaksana	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp. 382.206.500
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 588.760.500
3	Bidang Kemasyarakatan	Rp. 90.400.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 113.743.000

(Sumber : APBDes Desa Ngargomulyo Tahun 2016 di olah peneliti tahun 2017)

Selanjutnya Penggunaan keuangan desa tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penggunaan Keuangan Desa Ngargomulyo Tahun 2017

No	Tim Pelaksana	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 438.914.500
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 824.975.000
3	Bidang Kemasyarakatan	Rp. 3.500.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 112.061.000

(Sumber : APBDes Desa Ngargomulyo Tahun 2017 di olah peneliti Tahun 2017)

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan proses pelaksanaan keuangan Desa Ngargomulyo telah dilaksanakan serta melibatkan masyarakat secara luas baik sebagai pekerja atau sebagai pengawas kinerja pemerintah Desa. Dengan partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan artinya pemerintah sekaligus melakukan asas transparansi kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sangat diharapkan sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan khususnya pembangunan, tidak mungkin pembangunan hanya dilakukan oleh perangkat desa saja tanpa melibatkan masyarakat secara luas.

c. Penata Usahaan

Pada tahapan penatausahaan keuangan desa yang merupakan pencatatan secara khusus yang dilakukan oleh Bendahara Desa untuk mencatat seluruh transaksi baik berupa anggaran yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Gimin selaku Bendahara Desa Ngargomulyo terdapat beberapa kegiatan pencatatan mengenai pengelolaan keuangan desa.

“Penatausahaan atau yang lebih mudah disebut dengan pencatatan yang dilakukan bendahara secara rinci, pengeluaran ataupun pemasukan sekecil apapun harus dicatat dengan benar karena apabila ada kesalahan atau sampai tidak dicatat akan banyak menimbulkan pertanyaan terutama oleh BPD yang selalu mengawal kebijakan desa. Adapun beberapa yang di catat baik penerimaan maupun pengeluaran yang harus di catat oleh bendahara misalnya: Pendapatan transfer yang berupa Dana Desa, Bagihasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, serta bantuan keuangan serta keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa” Ungkapnya dalam wawancara langsung di Kantor Desa Ngargomulyo

Selain melakukan pencatatan seperti yang di jelaskan oleh bendahara desa diatas, bendahara juga wajib mencatat buku administrasi desa yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa yang wajib dilaksanakan desa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian keempat administrasi keuangan desa pada pasal 17 dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Buku rencana anggaran biaya
2. Buku kas pajak
3. Buku kas umum
4. Buku kas pembantu kegiatan
5. Buku bank desa

Menurut M Gimin Desa Ngargomulyo telah melakukan pencatatan buku tersebut diatas dengan baik, namun saat ditanya terkait kendala yang dihadapi olehnya M Gimin mengungkapkan:

“Tentu semua pekerjaan memiliki kendala termasuk bendahara desa. Apalagi jika bendahara desa yang memiliki pendidikan yang hanya pendidikan menengah keatas saja pasti mengalami kesulitan seperti saya sewaktu awal menjadi bendahara desa. Kendala yang saya hadapi bingung

dalam pengisian buku buku tersebut karena saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka dari itu perlu adanya pelatihan yang saya ikuti sehingga bisa seperti sekarang. Saat ini untuk pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran serta pencatatn pada buku administrasi telah dilakukan secara baik dan tertib”

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, penatausahaan keuangan di desa Ngargomulyo sudah dilakukan dengan cukup baik meskipun pada awalnya terdapat kendala namun dapat diatasi dengan belajar yang menghasilkan penatausahaan di desa Ngargomulyo tertib dan disiplin, serta semua pencatatan yang dilkauan telah berdasarkan dengan ketentuan baik penerimaan dan pengeluaran serta seluruh pendapatan asli desa tak lupa juga dicatat sebagai penerimaan desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Kemudaian pada tahap ini masing masing tim pelaksana tingkat desa mambuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan selama satu tahun anggaran. Untuk laporan pertanggungjawaban dari desa ke Kabupaten dibuat dua kali selama satu tahun.

Seperti yang diungkapkan oleh bendahara Desa Ngargomulyo Bapak M Gimin dalam wawancara langsung di Kantor Desa Ngargomulyo.

“Bapak M Gimin selaku bendahara desa mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa yang akan dilaporkan ke kabupaten di buat dua kali selama satu tahun. Laporan semester 1 dan laporan akhir tahun berupa realisasi APBDes. Pemerintah desa Ngargomulyo selalu tepat

waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dengan catatan dana transfer dari pemerintah tidak ada penundaan atau terlambat turunnya. Hal tersebut sangat menghambat pelaksanaan program dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang sedikit molor” Ujar M Gimin dalam wawancara di Kantor Desa Ngargomulyo.

Adapun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan desa Ngargomulyo pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
APBDes Desa Ngargomulyo Tahun 2017

Pendapatan Desa	Rp. 1.379.450.500
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 57.480.000
b. Dana Desa	Rp. 791.156.000
c. Bagi Hasil Pajak	Rp. 20.329.000
d. Retribusi	Rp. 2.746.000
e. Alokasi Dana Desa	Rp. 433.701.000
f. Bantuan Gubernur	Rp. 35.000.000
g. Silpa Tahu Lalu	Rp. 14.018.000
h. Pendapatan lain	Rp. 5.020.500
Belanja Desa	Rp. 1.379.450.500
a. Bidang Pemerintahan Desa	Rp.438.914.500
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 824.975.000
c. Bidang Pembangunan Masyarakat	Rp.3.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 112.061.000

(Sumber : APBDes Desa Ngargomulyo 2017 di olah peneliti Tahun 2017)

Berdasarkan tabel APBDes diatas maka dapat disimpulkan keuangan yang telah dikelola oleh pemerintah desa Ngargomulyo telah habis digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat dan juga untuk oprasional pemerintah desa. Tabel diatas dapat juga dilihat pada *website* desa Ngargomulyo maupun di kantor Desa Ngargomulyo, ini sebagai wujud pemerintah desa menjalankan asas transparansi dan akuntabel.

Asas transparansi yang dijalankan pemerintah Desa Ngargomulyo bertujuan untuk mempermudah bagi setiap warga untuk mengetahui proses penyaluran

anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa. Sebagai wujud transparansi kepada masyarakat maupun pemerintah Kabupaten untuk mempermudah mengakses informasi terkait APBDes pemerintah memanfaatkan sistem informasi desa sehingga siapapun kapanpun dapat melihat wujud transparansi pemerintah Ngargomulyo. Sebelum menyampaikan kepada masyarakat pemerintah desa terlebih dahulu menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui BPD ataupun perangkat desa lainnya. Seperti yang disampaikan oleh kepala desa Ngargomulyo Bapak Yatin dalam wawancara langsung di kantor Desa Nargomulyo.

“ Transparansi yang dilakukan pemerintah desa Ngargomulyo selain melalui *website* resmi desa. Pemerintah Desa menyampaikan laporan akhir kegiatan serta keuangan kepada perangkat desa yang terdiri dari Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa, RT, RW yang kemudian perangkat desa tersebut menyampaikan ke pada masyarakat di Dusun setempat masing masing agar semua bisa mengetahui penggunaan keuangan desa” Ujar Bapak Yatin dalam wawancara langsung di kantor desa Ngargomulyo

Berdasarkan uraian secara keseluruhan diatas, maka pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa terintegral atau tidak dapat terpisahkan antar keduanya. Hakikat dari pelaporan adalah dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian pelaporan keuangan desa adalah kewajiban pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan di desa Ngargomulyo dijadikan sebagai tolak ukur atas pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran atau juga bisa disebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kedepannya. Tentunya akan diketahui juga faktor-

faktor yang berpengaruh selama pengelolaan keuangan desa yang akan penulis bahas pada pembahasan berikutnya. Selain itu sebagai wujud transparansi pemerintah desa telah membuat semua laporan kegiatan yang kemudian di *upload* di *webiste* resmi desa sehingga semua masyarakat bahkan semua orang dapat mengetahuinya.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Nagargomulyo

Dalam proses apapun pastinya akan memiliki faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilakukan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang di miliki pendidikan sebatas sekolah menengah atas. Adapun peneliti mendapatkan Sumber daya manusia merupakan faktor yang pertama dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam sumber daya manusia terdapat indikator tambahan yang menjadi pendukung tingkat kualitas pengelola keuangan desa. Adapun faktor pendukung agar sumber daya manusia pengelola keuangan desa baik yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan yang mereka tidak dapatkan selama dimasyarakat. Pendidikan juga sangat penting untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat

bersaing dengan satu sama lainnya. Sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa Ngargomulyo masih memiliki pendidikan yang rendah.

Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Ngargomulyo saat di tanya tentang pendidikan yang telah di capai oleh sumber daya manusia atau perangkat desa di Ngargomulyo.

“Pendidikan merupakan pilar atau landasan sebagai pengembangan sumber daya manusia yang baik namun perlu diketahui di Desa Ngargomulyo ini semua perangkat hanya mengenyam pendidikan sebatas sekolah menengah atas, sulit untuk mencari dengan tingkat pendidikan yang tinggi seperti di kota kota besar. namun kita apa adanya saja lulusan SMA tidak apa asal kita bekal dengan pelatihan pengembangan sumber daya manusia agar semua sumber daya manusia yang ikut serta mengelola keuangan desa ini kompeten di bidangnya masing masing. Misalnya pada pengelola sistem informasi desa yang hanya lulusan SMA apa mungkin bisa mengelola *website* dengan baik kalo tidak dilakukan pelatihan. Pelatihan seperti ini pemerintah sering adakan dan Ngargomulyo selalu berpartisipasi untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Ungkapnya dalam wawancara langsung di Kantor Desa Ngargomulyo.

Adapun daftar perangkat Desa Ngargomulyo berdasarkan pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Daftar Pendidikan Perangkat Desa Ngargomulyo

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Yatin	Kades	SMA
2	M.Muji	Sekdes	SMA
3	Sri Endang M.	Kaur.Pemerintah	SMA
4	Sutrisno	Kaur.Pembangunan	SMA
5		Kaur.Kesra	
6	M.Gimin	Kaur.Uang	SMA
7	Widodo	Kaur Umum	SMA
9	Jumari	Kadus Sabrang	SMA
10	Suhardi	Kadus Kembang	SMP

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
11	Sartono	Kadus Tanen	SMA
12	Gimar	Kadus Batur Ngisor	SMP
13	Bakrun	Kadus Batur Duwur	SMA
14		Kadus Braman	
15	Naru	Kadus Gemer	SMA
16	M.Ponidi	Kadus Tangkil	SMA
17		Kadus Bojong	
18	Suratno	Kadus Ngandong	SMP
19	Kemis	Kadus Karanganyar	SMA

Sumber : Diolah peneliti Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Ngargomulyo dapat dikatakan keseluruhan memiliki batas pendidikan pada lulusan sekolah menengah atas saja. Dengan tingkat pendidikan yang sebatas sekolah menengah atas sebetulnya akan menyita banyak waktu sumber daya manusia tersebut untuk beradaptasi dengan pekerjaannya yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya di sekolah. Perlu banyak diadakan pelatihan bagi sumber daya manusia yang memiliki pendidikan yang rendah tersebut agar menunjang pengelolaan keuangan desa.

Disisilain Desa Ngargomulyo merupakan desa yang terletak sangat jauh dengan pusat pendidikan misalnya Universitas dan lainnya sehingga sangat sulit untuk mendapat sumber daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Meskipun tingkat pendidikan yang dimiliki perangkat desa Ngargomulyo hanya sebatas pendidikan sekolah menengah atas untuk menjalankan semua pengelolaan keuangan hingga saat ini tidak ada kendala atau cukup di bilang baik, hanya saja masih perlu lagi ditingkatkan kemampuannya dalam acara pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan desa .

Pendidikan memang sangat penting namun bukan faktor penentu utama bagi pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal yang sangat dibutuhkan bukan hanya pendidikan justru yang sangat penting adalah kemampuan atau *skill* yang dimiliki pengelola keuangan desa. Kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang cukup diperhitungkan adalah mereka yang mampu mengoperasikan komputer, mengerti tentang teknologi informasi. Selain itu Desa Ngargomulyo memiliki pegawai yang kurang di berbagai posisi yang mengakibatkan rangkap jabatan oleh perangkat desa yang lainnya sehingga perangkat yang merangkap jabatan memiliki beban kerja lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya.

2. Ketrampilan atau Kemampuan Sumber daya manusia

Di era modern ini ketrampilan sumber daya manusia memang cukup diperhitungkan dalam pekerjaan apapun termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Ketrampilan yang harus dimiliki pengelola keuangan desa adalah dalam pengoperasian komputerisasi. Bagi pengelola keuangan desa kemampuan komputer merupakan suatu hal yang wajib dimiliki dimana keuangan desa yang harus dipertanggung jawabkan memerlukan laporan yang dibuat melalui komputerisasi, serta dalam memanfaatkan sistem informasi desa atau *website* juga diharuskan menggunakan komputer agar didapatkan hasil yang maksimal.

Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Ngargomulyo pada saat wawancara langsung di kantor desa Ngargomulyo

“Desa Ngargomulyo adalah desa yang mendukung jika pengelola keuangan desa harus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer atau laptop.

Untuk desa Ngargomulyo sendiri memiliki 3 komputer yang semuanya

dapat dioperasikan oleh semua perangkat desa. Bahkan dapat dilihat pada RKPDes pemerintah Desa menganggarkan pembelian laptop bagi BPD serta mengadakan pelatihan komputer dari program word sampai excel karena itu yang sangat dibutuhkan terlebih dahulu. Ujarnya dalam wawancar langsung di Kantor Desa Ngargomulyo

Berdasarkan uraian penjelasan Kepala Desa diatas serta melihat RKPDes Desa Ngargomulyo memang benar adanya dalam rencana tersebut didalamnya ada pengadaan laptop serta pelatihan komputer bagi perangkat desa. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam memandang pentingnya kemampuan komputer bagi perangkat desa untuk menunjang pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dengan meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam pengoperasian komputer juga berarti meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki desa. Meskipun masyarakat desa tetapi memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memiliki pengetahuan yang tinggi bukan hanya masyarakat perkotaan saja yang mampu mengoperasikan komputer.

Selain itu kekurangan sumber daya pada jajaran perangkat desa di Desa Ngargomulyo masih terdapat kekosongan di beberapa posisi hal ini disebabkan rendahnya partisipasi dan minat masyarakat sebagai perangkat desa. Pemerintah desa sebenarnya telah melakukan pendaftaran bagi perangkat desa yang posisinya masih kosong namun dari proses penjurian tersebut tidak ada yang lulus dalam tahap ujian dan kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Selain faktor tidak lulus dari jumlah masyarakat Desa Ngargomulyo yang kurang lebih berjumlah 2.400 jiwa hanya 4 orang yang mendaftarkan, sejatinya pemerintah

desa Ngargomulyo membuka lowongan jabatan yang kosong di 6 bagian. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penjangkaran pegawai ini disebabkan dengan faktor sumber daya masyarakat yang masih menganggap petani lebih baik di bandingkan dengan menjadi perangkat desa.

b. Informasi

Informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi yang dilakukan pada pengelolaan keuangan desa adalah sebelum musrenbangdes atau dengan kata lain pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan akan mulai dikelolanya keuangan desa dengan tahapan awal pemerintah desa mengajak dengan terbuka masyarakat umum untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi tentang akan dikelolanya keuangan desa bisa di sampaikan melalui sosialisasi atau dengan media internet melalui informasi desa, atau bisa juga melalui papan informasi desa.

Dalam memberikan informasi tentang akan dikelolanya keuangan desa kepala desa melalui kepala dusun menyampaikan kepada masyarakat agar menyiapkan apa saja yang ingin di sampaikan atau siapa yang ingin ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti yang dipaparkan oleh kepala desa Ngargomulyo terkait informasi yang di berikan kepada masyarakat.

“Tentunya kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Semua upaya kami lakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat selain untuk transparansi masyarakat juga harus tau karena rasa ingin tahunya masyarakat rendah maka kami yang berupaya untuk memberikan informasi sebaik mungkin. Misalnya informasi yang kita berikan melalui *website* resmi desa, melalui papan informasi desa meskipun papan informasi hanya terdapat di kantor desa upaya kami tidak samapai situ saja kami sampaikan

ke kepala dusun semua agneda desa agar di sampaikan ke masyarakat. Atas yang di sampaikan oleh kepala dusun tersebut menjadi penyambung lidah kepala desa tujuannya agar informasi sampai ke masyarakat. Informasi tersebut dapat disampaikan di yasinan, masjid, gereja dan sebagainya” Ujar Bapak Yatin selalu kepala desa dalam wawancara langsung di Kantor Desa Ngargomulyo.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti memang ditemui informasi yang dipasang oleh pemerintah desa Ngargomulyo dipapan informasi desa baik pengumuman tentang akan di adakannya musrembangdes tahun anggaran berikutnya. Selain informasi tersebut kurang pegawai di jajaran pemerintah desa Ngargomulyo juga di infromasikan melalui papan informasi desa serta *website* resmi desa dan juga sosiaalisasi disampaikan ke pada masyarakat melalui kepala dusun sebagai penyambung lidah ke masyarakat.

Selain kemudahan akses informasi pemerintah desa Ngargomulyo menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi desa di papan informasi desa yang telah tersedia. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widodo sebagai kaur umum Desa Ngargomulyo pada wawancara langsung di kantor desa Ngargomulyo.

“ Pembuatan papan informasi oleh pemerintah desa sebagai fasilitas publik yang didalamnya terdapat informasi tentang perkembangan desa terkini. Serta pengumuman tertentu yang diperuntuhkan untuk masyarakat Ngargomulyo”

Wujud transparansi yang dilakukan pemerintah desa bukan hanya melalui papan informasi desa harus dengan *website* resmi desa. Tujuannya bukan hanya masyarakat saja tetapi pemerintah daerah ataupun pusat dapat mengawasi secara langsung melalui *website* desa. Penggunaan *website* desa merupakan sebagai

pengimplementasian Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 86 Undang-undang Desa dijelaskan bahwa sistem informasi desa dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah membuat Pergub No 47 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan sistem informasi desa. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah desa mengoptimalkan serta mengikuti peraturan yang telah dibuat pemerintah sehingga munculah *website* resmi desa Ngargomulyo yaitu desangrgomulyo.co.id. berdasarkan pantauan peneliti pemerintah Desa Ngargomulyo telah memanfaatkan sistem informasi desa dsengan baik hal ini terbukti semua agenda serta berita terkini desa telah pemerintah desa input kedalam *website* desa. Bukan hannya berita saja pemerintah Desa Ngargomulyo juga menginput data APBDes Desa Ngargomulyo dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya benar desa Ngargomulyo telah memanfaatkan informasi desa dengan baik .

Secara keseluruhan dalam faktor informasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ngargomulyo. Penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat di Desa Ngargomulyo ini telah baik. Dimana dapat dilihat di *website* resmi desa semua berita, data dan lainnya. Selain menggunakan *website* pemerintah Desa Ngargomulyo juga menggunakan papan informasi sebagai sara pemberian informasi kepada masyarakat.

c. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur utama yang ada didalam desa sehingga partisipasinya sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga sebagai pengawas pemerintah desa. Peran serta masyarakat merupakan wujud dari besarnya harapan masyarakat untuk memajukan desanya dengan dibuktikan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat Desa Ngargomulyo memiliki keaneka ragaman yang berbeda salah satunya agama. Namun perbedaan tersebut bukan menjadi penghambat untuk tidak ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Dari masyarakat yang beragam tersebut justru menghasilkan program yang seimbang antara kebutuhan umat A dan kebutuhan umat B dapat tercover dengan baik oleh pemerintah dengan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Ngargomulyo dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan cukup antusias masyarakat ikut bergotong royong membantu demi kemajuan desa.

Partisipasi masyarakat yang baik juga didasarkan pada kebijakan pemerintah desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti yang diungkapkan kepala Desa Ngargomulyo dalam wawancara langsung di Kantor Desa Ngargomulyo.

“Partisipasi masyarakat di Desa Ngargomulyo sudah cukup baik ini di karenakan pemerintah desa memberikan kesempatan seluas luasnya kepa masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, namun hannya saja masyarakat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk ikut serta sehingga kembali lagi dikembalikan kepada pemerintah desa”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun secara langsung masyarakat tidak mau terlibat namun pemerintah desa telah memberikan kesempatan yang seluas luasnya. Namun selain kesempatan yang diberikan yang perlu diingat kembali adalah kemampuan masyarakat dalam pengelolaan yang masih rendah.

Namun kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak serta merta diterima dengan baik oleh masyarakat, pasalnya mereka memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam ikut serta mengelola keuangan desa. Seperti yang disampaikan oleh kepala Desa Ngargomulyo.

“Pemerintah memang memberikan kesempatan kepada masyarakat namun kemampuan masyarakat dalam pengelolaan yang tidak mumpuni. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan juga kemampuan yang kurang mencukupi”

Dengan demikian secara keseluruhan dalam indikator partisipasi masyarakat ini memang diketahui partisipasi masyarakat di Ngargomulyo ini cukup tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut karena ada kesempatan yang diberikan dari pemerintah desa kepada masyarakat untuk ikut serta mengelola keuangan desa dan atau sebagai pengawas keuangan desa. Namun sangat disayangkan sekali kedua sub indikator partisipasi yaitu kesempatan serta kemampuan masyarakat yang tinggi, tidak sebanding dengan kemampuan yang mumpuni untuk mengelola keuangan desa. Kemampuan ini juga didasari pada rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki pengelola keuangan desa. Sehingga secara keseluruhan penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Keningar

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan desa, peran serta pemerintah desa akan menentukan kearah mana keuangan desa akan dialokasikan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 6 telah diatur mekanisme pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dari itu penulis akan membahas satu persatu tahapan yang sesuai peraturan yang berlaku.

Desa Keningar merupakan desa yang tergolong dalam desa Swakarya dimana desa ini memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kelebihan dari hasil sumber daya alam yang dimiliki Desa Keningar telah dipasarkan ke luar daerah seperti misalnya hasil pertanian, cabai, sayur mayur dan lain sebagainya. Selain hasil pertanian Desa ini juga merupakan desa pertambangan. Mengapa disebut desa tambang karena di desa ini kita dapat melihat pertambangan pasir dimana mana, bahkan pasir yang di peroleh dari sumber daya alam Desa Keningar ini sudah terkenal hingga keluar kota. Kualitas yang bagus menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih berlangganan pasir dari desa ini. Berdasarkan ciri ciri tersebut sesuai dengan teori desa yang di ungkapkan oleh Sriarta bahwa desa swakarya mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri.

a. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang pertama dalam proses pengelolaan keuangan desa langkah awal menentukan arahnya adalah dengan merencanakan terlebih dahulu. Meskipun dalam proses perencanaan melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah desa memiliki wewenang menentukan prioritas penggunaan anggaran terhadap program yang ditetapkan. Sejatinya dalam proses perencanaan harus melibatkan semua unsur yang ada dalam desa baik lembaga maupun organisasi yang ada di desa, tujuannya adalah agar semua keinginan mereka dalam terpenuhi dengan baik. Dalam proses perencanaan kepala desa Keningar dibantu oleh Tim Pendamping Desa serta dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Kepala Desa Keningar bapak Tarmudji juga menyampaikan saat wawancara langsung di Kantor Desa Keningar.

“Kita upayakan semaksimal mungkin masyarakat dapat terlibat setiap tahunnya tahapan pertama yaitu musyawarah perencanaan pembangunan dusun kemudian baru diutus perdelegasi untuk mengikuti musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan di desa ini. Karena mayoritas masyarakat disini bekerja sebagai buruh mereka lebih mengutamakan pekerjaannya dibandingkan dengan ikut serta dengan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat disini cukup bagus tapi tingkat kehadiran laki-laki lebih sedikit ketimbang dengan perempuannya dalam acara rapat apapun di desa selalu diwakilkan kepada kaum perempuan. Namun dari tahun 2013-sekrang partisipasi masyarakat terus meningkat ” ujar kepala desa Keningar Bapak Tarmudji dalam wawancara langsung di Desa Keningar

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Keningar telah melibatkan masyarakat secara umum. Perencanaan yang terjadi bukan hanya sebatas dilakukan oleh pihak pemerintah desa saja. Pemerintah Desa Keningar telah melibatkan lembaga desa serta organisasi yang ada di Desa Keningar. Hasil dari musyawarah bersama masyarakat,

Badan Permusyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan lainnya kemudian akan di cantumkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penyusunan anggaran desa di bantu oleh tim pendamping desa dari kecamatan. Sehingga dapat dikatakan dalam penyusunan anagaran desa keningar belum mampu secara mandiri. Kemudian kepala Desa Keningar juga mengungkapkan terkait penyusunan anggaran desa dalam wawancara langsung di kantor Desa Keningar.

“Dalam proses penyusunan anggaran tentunya kita tidak mungkin sendirian ini berkaitan dengan keuangan negara masalahnya berat salah sedikit jadi malasalah. Jadi desa keningar didamping oleh tim pendamping desa dan tim PTPKD ((Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes disusun mengacu pada RPJMDes yang memiliki jangka waktu 6 tahun sedangkan untuk RKPDes hanya untuk masa satu tahun kerja pemerintah desa. Perencanaan yang dilakukan yang kemudian disusun dalam RKPDes Desa Keningar sudah mengacu dalam RPJMDes menurut penuturan Kepala Desa Keningar. Sehingga dalam indikator perencanaan ini secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes di Desa Keningar telah dilakukan dengan benar dan melibatkan semua unsur masyarakat meskipun yang berpartisipasi dalam musrenbangdesa tersebut kebanyakan adalah perempuan. Untuk penyusunan anggrannya Desa Keningar juga tidak melakukan secara mandiri melainkan masih melibatkan pihak pihak tertentu agar penyusunan anggran dapat tepat dan sesuai dengan kondisi keuangan Desa Keningar.

b. Pelaksanaan

Setelah proses perencanaan dilakukan kemudian tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaan penggunaan keuangan desa yang perlu diperhatikan adalah jumlah besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mengikuti peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 bahwa Dana Desa digunakan dengan ketentuan 30% sebagai gaji dan tunjangan perangkat desa dan 70% sebagai pembangunan desa. Selain dana desa pemerintah Desa Keningar secara keseluruhan membagi keuangan desa tersebut yang memiliki berbagai macam sumbernya untuk 4 bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang peningkatan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ibu Tity Endang S, Amd selaku kasi pembangunan desa menyampaikan bahwa:

“ Pelaksanaan pembangunan desa di Keningar ini melibatkan masyarakat sebagai pelaksana lapangan atau dalam arti kata pekerjanya. Jika dalam musrenbangdes partisipasi masyarakat laki lakinya kurang jika dalam tahap pembangunan sarana dan prasaran desa partisipasi masyarakat sangat antusias bahkan tergolong sangat banyak. Kami (pemerintah desa) sengaja merangkul masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Mereka bekerja sebagai tukang, kuli dan lain sebagainya kita sangat senang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa” Ujar ibu Tity Endang S, Amd selaku kasi pembangunan

Adapun rincian APBDes Desa Keningar pada tahun 2017 yang telah di peruntukan 4 bidang :

Tabel 3.7
Penggunaan Keuangan Desa Keningar Tahun 2017

No	Tim Pelaksana	Anggran
	a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp. 260.171.000
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 837.739.000
	c. Bidang Kemasyarakatan	Rp.19.300.826
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.46.138.000
	Jumlah Belanja	Rp. 1.163.248.826

Desa Keningar merupakan Desa yang kecil yang hanya terdiri dari 2 dusun saja. Ketika penulis melakukan penelitian melihat infrastruktur di desa ini sangat bagus meskipun merupakan desa kecil. Akses jalan menuju lorong lorong sudah terlihat di aspal ada juga sebagian di cor. Desa keningar merupakan kawasan tambang pasir yang setiap jamnya mobil truk lewat untuk memuat pasir sehingga dibutuhkan kontruksi bangunan jalan yang kuat untuk menghindari kerusakan pada waktu yang cukup singkat. Disini memang benar pemanfaatan keuangan desa untuk pembangunan saran dan prasana desanya sudah sangat baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan keuangan desa khususnya Dana Desa di Desa keningar sudah baik karena sudah berpedoman pada aturan yang ada yaitu 30% untuk gaji dan tunjangan pegawai dan 70% untuk pembangunan desa. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sudah baik dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun peneliti yang sempat mengunjungi desa Keningar. Namun dalam pelaksanaan keuangan desa untuk pengembangan ekonomi lokal keuangan desa di kelola oleh BUMDes untuk membentuk kumpulan ibu ibu mengembang usha kecil makanan ringan seperti keripik dan spondokan. Sehingga penulis dapat

menyimpulkan dalam pelaksanaan keuangan desa sudah dengan baik dilaksanakan oleh pemerintah Desa Keningar.

c. Penatausahaan

Pada tahap ini bendahara desa menjalankan fungsinya sebagai pencatat keuangan desa baik penerimaan maupun pengeluaran desa secara terperinci adapun menurut undang undang yang harus dicatat adalah buku administrasi desa yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa yang wajib dilaksanakan desa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian keempat administrasi keuangan desa pada pasal 17 dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Buku rencana anggaran biaya
2. Buku kas pajak
3. Buku kas umum
4. Buku kas pembantu kegiatan
5. Buku bank desa

Seperti yang dikatakan Bapak Sukadi ketika peneliti bertanya terkait kendala yang dihadapi dalam wawancara langsung di Kantor Desa Keningar

“ Bapak Sukadi mengatakan bahwa dalam pencatatan secara manual tidak ada masalah namun ketik sudah dihadapkan dengan Ms. Excel maka saya sudah pasrah biasanya di bantu oleh ibu Tity jika input data ke Excel agar dapat cepat untuk hitung hitungannya. Permasalahannya jadi kemampuan dalam pengoperasionalan komputer saja selebihnya tidak ada masalah”

Selain mencatat buku-buku diatas bendahara menulis penerimaan keuangan desa misalnya seperti transfer dari pemerintah yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil retribusi pajak, serta pendapatan asli desa yang bersumber dari tanah bengkok dan pajak. Secara keseluruhan semua telah di catat dengan baik oleh bendahara desa Keningar. Hal ini dapat terlihat dari rincian APBDes Desa Keningar yang telah terinci besaran biaya perbidang kegiatan hal tersebut menurut penulis tidak luput peran serta bendahara dalam pencatatan keuangan desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Kemudaiian pada tahap ini masing masing tim pelaksana tingkat desa mambuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan selama satu tahun anggaran. Untuk laporan pertanggungjawaban dari desa ke Kabupaten dibuat dua kali selama satu tahun anggaran. Hasil wawancara dengan bapak Tarmudji selaku kepala desa keningar mengatakan bahwa .

“ Untuk mekanisme pelaporan di bagi menjadi dua tahap tahap pertama dan tahap kedua. Desa Keningar selalu tepat waktu dalam pelaporan hasil pengelolaan keuangan desa. Tetapi jika keuangan desa tersebut telat datangnya khususnya yang keuangan desa bersumber dari transfer kita juga pelporan dan pelaksanaan juga telat tapi tetap kita upayakan semaksimal mungkin tepat waktu”

Dari uraian data diatas dan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa keningar telah tepat pada waktu yang telah di tentukan jika transfer dari pemerintah ke rekening desa tidak mengalami keterlambatan. Karena pemerintah pusat maupun daerah dalam mentransfer keuangan desa seperti dana desa misalnya terkadang terlambat dari

waktu yang seharusnya sudah di terima. Akibat dari keterlambatan tersebut bukan hanya laporan yang terlambat juga melaiikan keberlangsungan program juga menjadi terlambat.

Adapun rincian APBDes desa Keningar tahun anggaran 2017 yang disampaikan kepada masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.8
APBDes Desa Keningar Tahun 2017

Pendapatan	Rp. 1.163.348.826
a. Dana Desa	Rp. 763.266.000
b. Alokasi Dana Desa	Rp. 253.021.000
c. Bagi hasil pajak daerah	Rp. 18.636.000
d. Bagi hasil retribusi daerah	Rp. 2.693.000
e. Bantuan keuangan provinsi	Rp. 35.000.000
f. Pendapatan lain lain asli desa	Rp. 2.150.000
g. Hasil usaha, swadaya dan gotong royong	Rp. 54.000.000
h. Silpa tahun 2016	Rp. 34. 582.826
Belanja Desa	Rp. 1.163.348.826
a. Bidang penyelenggara pemerintahan	Rp. 260.171.000
b. Bidang pembangunan	Rp.837.739.000
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 19.300.826
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 46.138.000

(Sumber : APBDes Desa Keningar Tahun 2017 diolah peneliti tahun 2017)

Rincian ABPDes diataslah yang di laporkan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk yang berada di samping kantor desa Kaningar. Selain dengan menggunakan spandak tersbut pemerintah desa Keningar memiliki cara lain seperti yang di ungkapkan oleh bapak Tarmudji kepada penulis saat wawancara langsung di Kantor Desa Kaningar.

“Pelaporan hasil pengelolaan keuangan dalam satu tahun anggran atau transparansi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa selain dengan spanduk di samping kantor desa melalui perangkat desa kepala dusun, ketua

RT, RW sebagai penyambung lidah kepla desa menyampaikan langsung kepada masyarakat”

Dengan demikian dapat dikatakan pelaporan keuangan atau transparansi keuangan desa telah dilakukan pemerintah desa Kaningar dengan baik sehingga masyarakat mengerti penggunaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran. Dari tabel rincian APBDes di atas merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

Maka secara keseluruhan dari indikator ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat telah dilakukan dengan baik dan pemerintah desa mengupayakan agar transparansi ini terwujud dengan baik. Sebagai pertanggungjawabannya semua kegiatan yang dilakukan dapat dirasakan seperti jalan yang semakin bagus serta dalam pemberdayaan masyarakat terus meningkat ini terbukti ketika penulis mengunjungi salah satu kelompok usaha yang di naungi oleh pemerintah desa mengaku ada peningkatan pada taraf hidup masyarakat setelah pemerintah desa memberikan beberapa pelatihan kepada masyarakat yang terlibat. Secara keseluruhan dari tahap pengelolaan keuangan desa pemerintah desa telah menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti melibatkan partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa masyarakat sangat antusias dalam perencanaan maupun pelaksanaan keuangan desa. Sebagai wujud transparansi sekaligus menjalankan asas transparansi pemerintah desa Keningar telah membuat spanduk rincian APBDes selama satu tahun anggaran sebagai wujud transparansinya agar masyarakat lebih mengetahui keuangan desa di

gunakan untuk apa saja. Selain dengan menggunakan spanduk pemerintah desa menyampaikan kepada kepala dusun, RT, RW sebagai penyambung lidah kepala desa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran telah selesai dan menyampaikan rincian keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

Keningar

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan desa. Selain bertindak sebagai aktor dalam pengelolaan keuangan sumber daya juga berpengaruh dalam terlaksananya pelaksanaan yang baik juga. Dalam indikator sumber daya manusia memiliki sub yang masing masing mendukung terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas di antaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan tiang terbentuknya sumber daya manusia yang baik berdasarkan ilmu ilmu yang tidak didapatkan di dalam masyarakat. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa adalah jika sumber daya pengelola keuangan desa tidak mengenyam pendidikan maka desa juga yang akan kesulitan dalam merealisasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan. Selain tidak dapat mengelola keuangan dengan baik sumber daya manusia yang tidak memiliki pendidikan akan kalah bersaing dengan desa yang lain yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Namun pengelola keuangan desa tidak harus

memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini juga disampaikan oleh kepala desa Keningar bapak Tarmudji dalam wawanca langsung di Kantor Desa Keningar.

“ Perangkat di desa keningar ini semua hanya memiliki pendidikan sebatas sekolah menengah atas saja hanya ibu Tity yang meraih pendidikan Diploma. Pendidikan itu memang bisa berpengaruh sama hasil pengelolaan tapi jika semua perangkat lulusan sarjana sumber daya manusia di desa keningar tidak memiliki itu pendidikan minimal sekolah menengah atas kemudian kita adakan pelatihan agar sumber daya manusia yang kita miliki berkualitas” ujar bapak Tarmudji dalam wawancara langsung di Kantor Desa Keningar

Adapun daftar perangkat desa serta tamatan pendidikan yang terakhir di tempuh :

Tabel 3.9
Perangkat Desa Keningar Berdasarkan Pendidikannya

Sumber : Diolah peneliti tahun 2017

Pendidikan yang dicapai oleh perangkat desa Keningar mayoritas pendidikan sekolah menengah atas. Hal ini yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan sistem informasi desa sebagai sarana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi yang memiliki peran sentral terhadap

Nama	Jabatan	Pendidikan
Tarmudji	Kepala Desa	SMA
Muryono	Sekretaris Desa	SMA
Sukadi	Bendahara Desa	SMA
Tity Endang S, Amd	Kasi Pembangunan Desa	Diploma III
Parman	Kasi Kesejahteraan	SMA
Tupan	Kadus Banaran	SMP
Suroto	Kadus Gondang Rejo	SMA

partisipasi masyarakat yang seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Namun hal ini belum dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah desa Keningar.

2. Ketrampilan

Ketrampilan merupakan kemampuan individu terhadap sesuatu keahlian untuk memperoleh hasil tertentu. Dalam pengelolaan keuangan desa ketrampilan yang harus dimiliki oleh pengelola keuangan desa adalah salah satunya ketrampilan mengoperasikan komputer. Dalam pengelolaan keuangan desa komputer menjadi alat penunjang pelaksanaan pembuatan laporan dan lain sebagainya.

Pentingnya komputer bagi pengelola dan pendidikan yang tinggi bagi pengelola keuangan desa. Untuk pendidikan di perangkat desa Keningar yang memiliki pendidikan sekolah menengah atas saja serta dalam kemampuan mengoperasikan komputer pengelola keuangan desa di desa Keningar tidak cukup memiliki kemampuan untuk mengelola komputer ini terbukti dengan tidak di kelolanya *website* desa dengan baik. *Website* desa yang sejatinya menjadi sumber informasi desa yang seharusnya di kelola dengan baik namun nyatanya pemerintah desa Keningar belum melakukan itu. Ini terlihat dari *website* desa yang tidak memiliki konten serta isinya yang belum mencerminkan desa semestinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia yang di miliki oleh desa keningar yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

b. Informasi

Informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi yang dilakukan pada pengelolaan keuangan desa adalah sebelum musrenbangdes atau dengan kata lain pemerintah desa memberikan

sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan akan mulai dikelolanya keuangan desa dengan tahapan awal pemerintah desa mengajak dengan terbuka masyarakat umum untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi tentang akan dikelolanya keuangan desa bisa di sampaikan melalui sosialisasi atau dengan media internet melalui informasi desa, atau bisa juga melalui papan informasi desa. seperti yang di ungkapkan oleh bapak Tarmudji dalam wawancara langsung di Kantor Desa Keningar.

“Dengan adanya musdus kemudian musdes maka itu artinya pemerintah desa memberikan informasi tentang akan dikelolanya keuangan desa melalui kepala dusun penyampaiannya”.

Namun informasi yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut tidak menggunakan *website* resmi desa, yang seharusnya pemerintah desa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan *website* desa yang tidak dikelola dengan baik bagaimana masyarakat akan mengetahui keuangan desa dan informasi yang ada di Desa. Sedangkan untuk spanduk keuangan desa baru dalam 2 bulan terakhir dipasang oleh pemerintah Desa Keningar. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Sumarji selaku masyarakat Desa Keningar yang rumahnya terletak di sebelah Kantor Desa Keningar mengungkapkan.

“ Pemerintah Desa Keningar memasang spanduk tentang APBDes hanya dalam waktu dua bulan terakhir sedangkan tahun tahun yang lalu tidak ada transparansi tentang keuangan desa”

Demikian dikatakan oleh masyarakat Desa Keningar sewaktu ditanya tentang spanduk yang terpasang di samping kantor Desa tersebut. Selain papan informasi tentang APBDes yang baru saja terpasang pemerintah Desa Keningar juga

tidak memanfaatkan *website* yang telah di berikan dari pemerintah hal ini dikatakan dalam wawancara karena kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola *website* resmi desa.

Kesimpulan pada indikator ini adalah informasi memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, apabila pemerintah desa tidak memberikan sosialisasi maka masyarakatpun tidak akan ada yang berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan keuangan desa. Sedangkan secara sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah Desa Keningar masih sangat buruk. Ini terlihat dari belum dikelolanya *website* desa oleh pemerintah desa keningar sehingga akan menyulitkan bagi siapapun yang ingin mencari informasi tentang desa ini. Belum dimanfaakannya sistem informasi desa dengan baik ini ditenggarai oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh Pemerintah Desa Keningar.

c. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur utama yang ada didalam desa sehingga partisipasinya sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga sebagai pengawas pemerintah desa. Peran serta masyarakat merupakan wujud dari besarnya harapan masyarakat untuk memajukan desanya dengan dibuktikan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Namun kepala desa Keningar mengungkapkan hal yang berbeda.

“Masyarakat berpartisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan saja karena masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa dikembalikan kepada

tim pengelola keuangan desa” ujarnya dalam wawancara langsung di Kantor Desa Keningar

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah diharapkan karena keuangan yang di kelola yang programnya akan membantu masyarakat baik dari peningkatan kualitas infrastruktur desa peningkatan perekonomian dan lain sebagainya. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa jika pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa.

Meskipun dalam fakta dilapangannya tidak ada masyarakat yang terlibat secara keseluruhan hingga proses pelaporan selesai. Masyarakat hanya memiliki kesempatan dalam perencanaan dan pelaksanaan saja meskipun pemerintah desa memberikan kesempatan. Namun tidak serta merta kesempatan yang telah diberikan kepada masyarakat masyarakat memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Seperti yang di ungkapkan bapak Sukadi dalam wawancara langsung di desa keningar.

“Kalo disuruh mengelola keuangan desa saya rasa masyarakat tidak mapu di balik pendidikan yang rendah masyarakat tidak memiliki pengalaman yang baik dalam hal ini”

Dengan demikian secara keseluruhan dari faktor partisipasi masyarakat memiliki pengaruh dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam pelaksanaanya. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Tarmudji bahwa masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan keuangan desa terutama dalam tahapan

pelaksanaan keuangan desa. Dalam tahapan perencanaan masyarakat yang antusias sangat meningkat dari tahun ketahun meskipun didominasi oleh kaum perempuan.

3. Pengelolaan Keuangan di Desa Dukun

Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan desa, peran serta pemerintah desa akan menentukan kearah mana keuangan desa akan dialokasikan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 6 telah diatur mekanisme pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dari itu penulis akan membahas satu persatu tahapan yang sesuai peraturan yang berlaku.

Desa Dukun merupakan desa yang tergolong dalam desa Swakarya dimana desa ini memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kelebihan dari hasil sumber daya alam yang dimiliki Desa Dukun telah dipasarkan ke luar daerah seperti misalnya hasil pertanian, cabai, sayur mayur dan lain sebagainya. Berdasarkan ciri ciri tersebut sesuai dengan teori desa yang di ungkapkan oleh Sriarta bahwa desa swakarya mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam proses perencanaan ini dipastikan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Meskipun dalam proses perencanaan melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah desa memiliki wewenang menentukan prioritas

penggunaan anggaran terhadap program yang ditetapkan. Pada tahap perencanaan kebijakan pemerintah Desa Dukun tahun 2016-2017 tidak jauh berbeda, semua menghadirkan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda dan juga tentunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam proses perencanaan kepala desa dibantu oleh Tim Pendamping Desa serta dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa.

Masyarakat sejatinya unsur dari pemerintah desa yang tidak bisa terlepas. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan masyarakat harus terlibat di dalamnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Yudo Wasito Selaku Sekretaris Desa Dukun sekaligus Ketua Tim Pengelolaan Keuangan Desa.

“Dalam proses perencanaan pembangunan desa pemerintah Desa Dukun melibatkan semua Elemen masyarakat, mulai dari tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh pemuda, kepolisian, koramil, kecamatan semua kita ikutkan. Tujuannya agar tidak ada yang terlewatkan program yang akan kita canangkan” Ujar bapak Yudo Wasito dalam wawancara langsung di Kantor Desa Duku.

Gambar 3.1
Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa Dukun



(Sumber : Dokumentasi Desa Dukun)

Selain itu penulis menyinggung terkait penyusunan APBDes apakah telah dilakukan secara mandiri atau dibantu dengan tim pendamping desa Bapak Yudo Wasito mengutarakan seperti berikut.

“Untuk penyusunan di lakukan secara mandiri itu saya tidak setuju karena desa tidak mungkin bisa melakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak ke tiga yaitu tim pendamping desa kecamatan”

Berdasarkan data diatas serta hasil waancara dengan sekretaris desa sekaligus ketua pelaksana pengelola keuangan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa Desa Dukun telah melibatkan masyarakat dalam perencanaannya yang melibatkan semua unsur yang ada di desa Dukun tanpa terkecuali. Namun dalam penyusunan APBDes pemerrintah Desa Dukun masih melibatkan tim pendamping desa yang menurutnya dapat memberikan masukan atas penyusunan yang di lakukan. Selain itu dengan adanya tim pendamping desa semua beban terasa ringan jika di kerjakan secara bersama dengan tim pendamping desa serta hasil dalam penyusunan terlihat lebih maksaimal.

Dalam tahapan ini Desa Dukun telah menerapkan asas transparansi, akuntabel dan partisipasi. Asas partisipatif ini terlihat dalam perencanaan yang

melibatkan masyarakat secara luas, dengan ini masyarakat dapat melihat semua perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Dukun. Namun transparansi kepada peneliti Pemerintah Desa Dukun tidak transparansi. Saat peneliti hendak melihat RKPDes desa Dukun dari pihak Perasngkat terkesan menutupi bahkan menghalangi peneliti untuk mendapatkan data yang penulis rasa perlu yaitu RKPDes serta APBDes Desa Dukun. Penulis telah mencoba beberapa cara yang di tempuh namun untuk mendapatkan RKPDes dan APBDes merupakan hal yang tidak mudah, sejatinya jika penulis mendapatkan data tersebut penelitian yang di lakukan ini akan semakin berkualitas yang didasarkan pada data yang tersedia.

Kemudian dalam menjalankan asas akuntabel sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dapat terlihat dari hasil yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti pembangunan jembatan dan jalan. Serta tertib dan disiplin anggaran, pengelola keuangan desa harus mengacu pada aturan yang telah berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dukun telah melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada BPKP dalam prose pengelolaannya mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Maka secara keseluruhan dalam tahap ini pemerintah desa menjalankan semua asas pengelolaan keuangan berdasarkan BPKP namun dalam asas transparansi kepada pihak luar termasuk penulis tidak di jalankan dengan baik.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini pemerintah desa memberikan anggaran yang dibutuhkan kepada masing masing tim pelaksana desa agar transparansi dan penyampaian

informasi tepat pada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini pemerintah desa Ngargomulyo membagi anggaran atas 4 (empat) bidang yaitu : Bidang penyelenggara pemerintah, bidang pembangunan, bidang pembinaan

No	Tim Pelaksana	Anggaran
1	Bidang Pemerintahan	Rp.586.698.000
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 780.731.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 34.400.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 166.316.000

kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa Dukun melibat partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan hal ini juga di ungkapkan oleh bapak Yudi Wasito dalam wawancara langsung di Kantor Desa Dukun.

“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sangat antusias sekali terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang berupa pembangunan fisik misalnya pembangunan jembatan yang sedang kita lakukan. Masyarakat sangat antusias untuk ambil alih bagian menjadi pekerja di sana. Selain sebagai pekerja mereka juga sebagai pengawas pelaksanaan pembangunanya”

Selain itu bapak Yudo Wasito mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh pelaksanaan pembangunan desa.

“Hambatannya secara administrasi tidak ada hanya saja dalam pembangunan fisik hambatannya pasti cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu berubahnya” Ungkapnya dalam wawncara langsung di Desa Dukun.

Adapun rincian APBDes Desa Dukun pada tahun 2017 yang di gunakan untuk 4 bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Penggunaan Keuangan Desa Dukun 2017

Secara keseluruhan dalam indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh pemerintah desa Dukun dengan cukup baik dan melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat. Asas partisipatif kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Dukun terlihat sudah dilakukan dengan baik terbukti sewaktu peneliti mengunjungi pembangunan jembatan Dukun-Wates banyak pekerja yang ikut serta merupakan masyarakat dukun itu sendiri. Hal ini tentu dilakukan selain untuk melibatkan masyarakat agar memiliki visi untuk memajukan desanya pemerintah desa Dukun mengangkat perekonomian masyarakat yang terlibat didalamnya.

c. Penatausahaan

Pada tahapan penatausahaan keuangan desa yang merupakan pencatatan secara khusus yang dilakukan oleh Bendahara Desa untuk mencatat seluruh transaksi baik berupa anggaran yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Selain melakukan pencatatan, bendahara juga wajib mencatat buku administrasi desa yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa yang wajib dilaksanakan desa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian keempat administrasi keuangan desa pada pasal 17 dalam Permendagri Nomor 47 Tahun

2016. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Buku rencana anggaran biaya
2. Buku kas pajak
3. Buku kas umum
4. Buku kas pembantu kegiatan
5. Buku bank desa

Selain mencatat buku administrasi diatas bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran. Adapun penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dukun lakukan:

Tabel 3.51
Pendapatan Desa Dukun 2017

Pendapatan	Jumlah
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 105.993.000
b. Dana Desa	Rp. 805.231.000
c. Bagi hasil pajak Daerah	Rp. 20.827.000
d. Retribusi Daerah	Rp. 3.089.000
e. Alokasi Dana Desa	Rp. 574.301.000
f. Bantuan Provinsi	Rp. 35.000.000
g. Pendapatan lain yang sah	Rp. 21.704.000

Sumber : APBDes Desa Dukun Tahun 2017 diolah peneliti tahun 2017

Seiring dengan pencatatan dan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa penlusi melakukan wawancara langsung dengan bendahara desa Bapak Yazid Aiman Fikri, S.E terkait dengan kendala yang di hadapi dalam penatausahaan yang dilakukan.

“ Kendala yang dihadapi tidak ada. Karena saya lulusan sarjana ekonomi akuntansi penatausahaan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku” Ujar bapak Yazid Aiman Fikri, S.E dalam wawancara langsung di Kantor Desa Dukun

Dengan demikian secara keseluruhan proses penatausahaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Dukun yang dalam hal ini menjadi kewajiban seorang bendahara desa telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain mencatat semua penerimaan dan pengeluaran secara berkala bendahara desa juga telah mencatat buku administrasi yang telah di tetapkan berdasarkan undang undang sesuai dengan transaksi yang dilakukan.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Kemudian pada tahap ini masing masing tim pelaksana tingkat desa mambuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan selama satu tahun anggaran.

Pelaporan merupakan kegiatan yang terpenting dari sebuah akhir pelaksanaan kegiatan pentingnya dapat menjadi bahan evaluasi baik pemerintah desa atau masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakatnya. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa dapat terlihat dari hasil yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap penggunaan keuangan desa. Misalnya

seperti dalam RKPDes terdapat pembangunan infrastruktur maka dalam pelaksanaannya pembangunan tersebut dapat di pertanggungjawabannya baik secara fisik ataupun non fisik. pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dukun sudah cukup baik. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa.

“Menurut Bapak Yudi Wasito pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dukun sudah tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik RAB maupun pagu anggaran. Serta dalam pembuatannya tidak ada kendala yang di hadapi oleh pemerintah Desa Dukun”

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Dukun telah dilakukan secara tepat waktu oleh pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa memberikan laporan kepada Bupati yang dilakukan selama dua kali selama satu tahun anggaran yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Selaian laporan ke pada masyarakat pemerintah desa juga berhak memberikan laporan terkait penggunaan keuangan kepada masyarakat.

Tabel 3.11
Rincian APBDes Desa Dukun Tahun 2017

Pendapatan	Jumlah
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 105.993.000
b. Dana Desa	Rp. 805.231.000
c. Bagi hasil pajak Daerah	Rp. 20.827.000
d. Retribusi Daerah	Rp. 3.089.000
e. Alokasi Dana Desa	Rp. 574.301.000
f. Bantuan Provinsi	Rp. 35.000.000
g. Pendapatan lain yang sah	Rp. 21.704.000

Pembiayaan	Jumlah
Bidang Pemerintahan	Rp.586.698.000
Bidang Pembangunan Desa	Rp. 780.731.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 34.400.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 166.316.000

(Sumber: APBDes Desa Dukun Tahun 2017 diolah peneliti tahun 2017)

Secara keseluruhan dalam indikator pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Dukun telah baik seperti yang telah di sampaikan oleh Sekretaris Desa Dukun Sekaligus Ketua Tim PTPKD Desa Dukun bahwa pelaporannya telah sesuai dan telah tertib dan disiplin anggran sesuai dengan RAB dan Pagu Anggran yang telah di tentukan.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dukun

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan desa. Selain bertindak sebagai aktor dalam pengelolaan keuangan sumber daya juga berpengaruh dalam terlaksananya pelaksanaan yang baik juga. Dalam indikator sumber daya manusia memiliki sub yang masing masing mendukung terbentuknya sumber daya manusa yang berkualitas di antaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan tiang terbentuknya sumber daya manusa yang baik berdasarkan ilmu yang tidak didapatkan di dalam masyarakat. Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa adalah jika sumber daya pengelola keuangan desa tidak

mengenyam pendidikan maka desa juga yang akan kesulitan dalam merealisasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan. Selain tidak dapat mengelola keuangan dengan baik sumber daya manusia yang tidak memiliki pendidikan akan kalah bersaing dengan desa yang lain yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Namun pengelola keuangan desa tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus ditempuh melalui bangku sekolah untuk memperkaya pengethaun terhadap setiap individu. Dalam pengelolaan keuangan desa pengelola harus memiliki pendidikan paling rendah adalah tingkat sekolah menengah atas. Meskipun itu adalah syarat minimum yang diwajibkan sekolah menengah atas hanya memiliki kemampuan yang terbatas jika sumber daya manusiayan tidak memiliki kemampuan khusus. Untuk mengukur kemampuan pengelola apakah di pentingkan pada pembahasan berikutnya penulis bahas.

2. Ketrampilan Sumber Daya Manusia

Selain pendidikan, ketrampilan atau kemampuan yang dimiliki seorang pengelola keuangan desa juga perlu diperhitungkan jika memang memiliki kemampuan lebih. Seperti tabel dibawah ini yang menyatakan pentingnya ketrampilan komputer bagi pengelola keuangan desa.

Secara keseluruhan dalam faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa pada indikator sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik, terutama kemampuan komputer sangat

dibutuhkan dalam pengelola keuangan desa. Seperti yang di ungkapkan oleh Sekretaris Desa Dukun Bapak Yudo Wasito dalam wawancara langsung di Kantor Desa Dukun.

“Sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Dukun sudah sangat baik. Karena kami mengutamakan perangkat yang bisa dan mengerti tentang IT. Di era sekarang ini kemampuan komputer sangat di perhitungkan. Di desa Dukun sendiri ada beberapa perangkat yang tidak mampu mengoperasikan komputer maka kita berikan pelatihan tujuannya agar perangkat memiliki kualitas yang baik dan memiliki daya saing” Ujar Bapak Yudo Wasito dalam wawancara langsung di Kantor Desa Dukun

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan data yang diperoleh penulis dari responden maka dapat disimpulkan bahwa peran sumber daya yang berkualitas sangat di butuhkan seperti yang di ungkapkan oleh bapak Yudo Wasito bahwa perangkat desa Dukun harus memiliki kemampuan IT yang itu artinya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi serta memiliki kemampuan lebih dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sumber daya yang berkualitas akan membantu terbentuknya pemerintahan desa yang berkualitas juga. pemerintah desa yang sejatinya melayani masyarakat seharusnya lebih mengerti dari pada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan itu didasari pada pendidikan serta pengalaman yang di miliki oleh setiap pengelola keuangan di desa.

b. Informasi

Informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi yang dilakukan pada pengelolaan keuangan desa pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan akan

mulai dikelolanya keuangan desa dengan tahapan awal pemerintah desa mengajak dengan terbuka masyarakat umum untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi tentang akan dikelolanya keuangan desa bisa di sampaikan melalui sosialisasi atau dengan media internet melalui informasi desa, atau bisa juga melalau papan informasi desa. Pemerintah desa Dukun memberikan informasi melalui papan informasi desa yang terletyak di berbagai sudut desa serta melalui media internet melalui *website* resmi desa serta melalui *facebook* resmi desa. Langkah yang di ambil oleh permerintah desa untuk memberikan informasi melalui laman *facebook* adalah karena masyarakat mayoritas membuka *facebook* dari pada membuka *website* resmi desa.

Selama peneliti melakukan penelitian di desa Dukun, di setiap sudut desa terpasang spanduk tentang rincian APBDes. Tujuannya ini merupakan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat. Dengan pemsangan spanduk di berbagai tempat ini lah penulis melakukan pengujian apakah responden setuju jika pemerintah desa mermasang papan informasi tentang rincian APBDes.

Seperti yang penulis jelaskan di atas untuk pembuatan papan informasi di desa Dukun ini sangat lah baik. Hampir setiap sudut desa terdapat papan informasi yang berisikan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain menggunakan papan informasi sejatinya APBDes desa juga di sebarluaskan melalui internet atau *website* resmi desa.

Hal diatas juga di sampaikan oleh Bapak Yazid Aiman Fikri, S.E selaku bendahara desa serta pemegang admin *website* desa Dukun.

“ Dalam pemanfaatan sistem informasi desa yang merupakan instruksi undang undang pemerintah desa memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik. Beberapa hari yang lalu kami mengikuti pelatihan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kemampuan mengelola sistem informasi desa dengan baik” wawancara langsung di kantor desa Dukun.

Berdasarkan keterangan diatas serta data yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan informasi memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa terutama informasi kepada masyarakat. Masyarakat tidak akan tau jika pemerintah Desa nya tidak memberikan informasi tentang akan dikelolanya keuangan desa. Sejauh ini penulis mengamati *website* desa Dukun telah di manfaatkan dengan baik. Namun pemerintah desa Dukun tidak menyertakan laporan APBDes di dalam *website* tersebut, yang seharusnya pemerintah Desa Dukun menyantumkan agar semua pihak baik ispektorat maupun pihak manapun yang ingin mengetahui tentang infdormasi keuangan desa lebih mengerti tanpa harus datang ke desa langsung. Penggunaan informasi desa sebagai wujud transparans pemerintah desa kepada masyarakat merupakan langkah yang baik untuk menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa.

c. Partisipasi Masyarakat

Masyrakat merupakan unsur utama yang ada didalam desa sehingga partisipasinya sangat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga sebagai pengawas pemerintah desa. Peran serta masyarakat merupakan wujud dari besarnya harapan masyarakat untuk memajukan desanya dengan dibuktikan keikutsertaan masyarakt dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti yang telah ungkapkan dalam tahap perencanaan bahwa partisipasi masyarakat sangat diharapkan.

Masyarakat sebagai unsur yang dilayani oleh pemerintah desa. Selain itu pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Partisipasi yang tinggi oleh masyarakat harus di barengi dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta mengelola keuangan desa baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Untuk itu penulis menumpulkan data yang berkaitan dengan pemerintah desa memebrikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa. Atas pemberian kesempatan ini Sekretaris Desa Dukun sekaligus ketua PTPKD mengatakan bahwa .

“Pemerintah desa membuka pintu selebar lebasnya bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun seringkali yang membuat kesempatan itu hilang ialah kemampuan yang di miliki oleh masyarakat tidak mumpuni”

Maka demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan desa. Begitu juga menurut penulis bahwa masyarakat tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa saja dalam pengelolaannya masih memerlukan tenaga pendamping serta beberapa kali mengikuti pelatihan guna menunjang kemampuan aparatur desa.

Secara keseluruhan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam pengelolaan keuangan desaa terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Tingginya tingkat antusias masyarakat dalam pengelolaan keuangan

desa seperti yang telah dijabarkan dalam beberapa pembahasan sebelumnya merupakan bentuk dari apresiasi masyarakat dalam memajukan desanya.

4. Analisis Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa. berdasarkan analisis hasil wawancara yang telah penulis jelaskan sebelumnya di atas dalam proses ini pemerintah desa melibatkan semua unsur masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan desa. selanjutnya dapat kita lihat dengan hasil kuesioner yang telah peneliti kumpulkan terkait dengan indikator perencanaan memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perencanaan Melibatkan Masyarakat Umum

	Kategori	Frekuensi	Presentase
Sumber : Diolah peneliti tahun 2017	Sangat Setuju	63	76 %
	Setuju	15	18%
	Kurang Setuju	5	6%
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	83	100%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan masyarakat umum, 63 responden dengan persentase 76% memilih sangat setuju, 15 responden dengan persentase 18% memilih setuju, dan sisanya 5 responden dengan persentase 6% memilih

kurang setuju. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan dengan melibatkan masyarakat umum sebagian besar responden dari ketiga desa tersebut setuju jika perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat secara umum bukan hanya masyarakat tertentu saja.

Selanjutnya dengan pernyataan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan tanpa tenaga pendamping atau secara mandiri mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.13
Penyusunan APBDes Secara Mandiri

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	3	3,6 %
Setuju	12	14,5%
Kurang Setuju	10	12,1%
Tidak Setuju	38	45,7%
Sangat Tidak Setuju	20	24,1%
Total	83	100%

Sumber : Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diuraikan bahwa penyusunan APBDes di Desa Ngargomulyo, Desa Dukun, Desa Keningar mendapatkan hasil sebagai berikut, 3 responden dengan persentase 3,6% memilih sangat setuju, 12 responden dengan persentase 14,5% memilih setuju, 10 responden dengan persentase 12,1% memilih kurang setuju, 38 responden dengan persentase 45,7% memilih tidak setuju, 20 responden lainnya dengan pesentase 24,1% memilih sangat tidak setuju. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBDes dilakukan secara mandiri dari 83 responden dari tiga desa tersebut sebagian besar responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara yang

telah diuraikan sebelumnya bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tidak dapat dilakukan secara mandiri melainkan memerlukan tenaga pendamping yang telah disediakan oleh kecamatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan selanjutnya setelah tahapan perencanaan. Pada tahap ini semua yang telah di rencanakan yang telah tertera dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di setiap masing masing desa. pelaksanaan penggunaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan pada 4 bidan yaitu : bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pengembangan masyarakat, dan bidang pember dayaan masyarakat serta dana tak terduga lainnya. Sehingga penulis melakukan pengumpulan data dengan kuesioner dengan pernyataan keuangan desa digunakan sebagai pembangunan sara dan prasaran desa mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.14
Keuangan Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	51	61,4 %
Setuju	31	37,4%
Kurang Setuju	1	1,2%
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber : Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diuraikan bahwa keuangan desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun digunakan untuk pembangunan sarana dan prasara dengan jumlah 83 responden, 51 responden dengan persentase 61,4%

memilih sangat setuju, 31 responden dengan persentase 37,4% memilih setuju, 1 responden dengan persentase 1,2% memilih kurang setuju. Dengan demikian dapat diuraikan bahwa penggunaan keuangan desa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan bahwa keuangan desa digunakan sebagai pembangunan sarana dan prasarana desa.

Selain digunakan sebagai pembangunan sarana dan prasarana desa, keuangan desa juga sebagai pengembangan potensi ekonomi lokal. Dari pernyataan ini mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.15
Keuangan Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	48	57,8 %
Setuju	35	42,2%
Kurang Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber : Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas amaka dapat di uraikan bahwa keuangan desa digunakan sebagai pengembangan potensi ekonomi lokal dengan 83 responden, 48 responden dengan persentase 57,8% memilih sanagat setuju, 35 responden dengan persentase 42,2% memilih setuju. Dengan demikian semua responden dari ketiga desa tersebut setuju jika keuangan desa digunakan seagai pengembangan potensi ekonomi lokal di desanya masing masing.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahapan pencatatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh bendahara desa baik penerimaan serta pengeluaran desa secara terus menerus. Pada indikator ini peneliti menggunakan pernyataan bendahara desa melakukan pencatatan semua penerimaan serta pengeluaran desa mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.16
Bendahara Desa Melakukan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	53	63,9 %
Setuju	30	36,1%
Kurang Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber : Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dengan pernyataan bendahara desa melakukan penatausahaan baik dari penerimaan serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa mendapatkan hasil sebagai berikut, 53 responden dengan persentase 63,9% memilih sangat setuju, 30 responden dengan persentase 36,1% memilih setuju. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dari jumlah 83 responden yang di ambil dari ketiga desa tersebut setuju jika bendahara desa melakukan pencatatan baik penerimaan serta pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pada hasil wawancara yang telah dibahas sebelumnya mengemukakan bendahara desa telah melakukan penatausahaan dengan sangat baik, meskipun memiliki beberapa kendala terutama pada awal masa jabatan yang diterima oleh bendahara desa tersebut.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan keduanya. Pelaporan keuangan dilakukan dua kali selama satu tahun anggaran. Pelaporan yang dilakkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat harus sesuai dan tepat waktu. Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan pembagian kuesioner dengan pernyataan bahwa pemerintah desa melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban secara tepat waktu mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.17
Pemerintah Desa Membuat Laporan dan Pertanggungjawaban Tepat Waktu

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	45	54,2 %
Setuju	25	30,1%
Kurang Setuju	10	12,1%
Tidak Setuju	3	3,6%
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber : Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa pernyataan pemerintah desa membuat laporan dan pertanggungjawaban secara tepat waktu dengan 83 responden mendapatkan hasil, 45 responden dengan persentase 54,2% memilih sangat setuju, 25 responden dengan persentase 30,1% memilih setuju, 10 responden dengan persentase 12,1% memilih kurang setuju, 3 responden dengan persentase 3,6% memilih tidak setuju. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden setuju jika pemerintah desa membuat laporan dan

pertanggungjawaban secara tepat waktu seperti yang diungkapkan dalam wawancara diatas dalam pembahasan sebelumnya.

Selain membuat laporan kepada masyarakat pemerintah desa juga harus membuat rincian APBDes yang dapat diketahui oleh masyarakat sebagai wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan kuesioner dengan pernyataan bahwa pemerintah desa membuat rincian APBDes sebagai wujud transparansi kepada masyarakat mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pemerintah Desa Membuat Papan Informasi Rincian APBDes

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	47	56,6 %
Setuju	31	37,4%
Kurang Setuju	5	6%
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa pemerintah desa membuat papan informasi tentang rincian APBDes setiap desanya masing masing dengan hasil, 47 responden dengan persentase 56,6% memilih sangat setuju, 31 responden dengan persentase 37,4 memilih setuju, 5 responden dengan persentase 6% memilih kurang setuju. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa 83 responden sebagian besar menyatakan setuju jika pemerintah desa membuat rincian APBDes sebagai wujud transparansi kepada masyarakat. pembuatan papan informasi tentang rincian APBDes ini telah dijalankan oleh ke 3 desa tersebut meskipun pada desa Keningar baru pada tahun 2017 saja pembuatan apapn

informasinya, tidak dilakukan pembuatan papan informasinya pada tahun sebelumnya.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen yang harus ada dalam pengelolaan keuangan desa dengan kata lain sumber daya manusia merupakan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pengelolaan keuangan desa. Pada indikator sumber daya manusia memiliki sub indikator yang mendukung terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan sumber daya manusia yang lainnya. Ada dua sub indikator dalam sumber daya manusia yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu : 1. Pendidikan, 2. Keterampilan sumber daya manusia. Dari sub indikator tersebut peneliti mendapatkan data yang peneliti peroleh dari hasil kuesioner sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang lebih luas yang tidak mereka dapatkan didalam bermasyarakat. Bagi pengelola keuangan desa pendidikan cukup diperhitungkan kemampuannya. Sehingga penulis mencari data tentang pentingnya pendidikan bagi pengelola keuangan desa mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.19
Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Pengelola Keuangan Desa

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	23	27,7 %
Setuju	18	21,7%
Kurang Setuju	11	13,3%
Tidak Setuju	25	30,1%
Sangat Tidak Setuju	6	7,2%
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa pentingnya pendidikan bagi pengelola keuangan desa dari 83 responden, 23 responden dengan persentase 27,7% memilih setuju, 18 responden dengan persentase 21,7% memilih setuju, 11 responden dengan persentase 13,35 memilih kurang setuju, 25 responden dengan persentase 30,1% memilih tidak setuju, 6 responden dengan persentase 7,2% memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden memilih tidak setuju. Pendidikan tinggi memang tidak menjadi tolak ukur sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas. Namun, dengan pendidikan yang tinggi seseorang memiliki derajat yang lebih tinggi di mata masyarakat.

2. Ketrampilan sumber daya manusia

Ketrampilan pengelola keuangan desa sangat diperlukan, apalagi ketrampilan mengoperasikan komputer yang sangat dibutuhkan bagi pengelola keuangan. Komputer tidak akan terlepas dari proses pengelola keuangan sehingga kemampuan setiap perangkat desa dalam menggunakan komputer sangat dipertimbangkan apabila sumber daya manusia memiliki kemampuan yang lebih. Sehingga penulis

melakukan pengumpulan data dengan kuesioner dengan pernyataan tentang pentingnya ketrampilan komputer bagi pengelola keuangan desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Pentingnya Ketrampilan Komputer Bagi Pengelola Keuangan Desa

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	28	33,7 %
Setuju	43	51,9%
Kurang Setuju	1	1,2%
Tidak Setuju	8	9,6%
Sangat Tidak Setuju	3	3,6%
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa pentingnya ketrampilan komputer bagi pengelola keuangan desa dengan 83 responden, 28 responden dengan persentase 33,7% memilih sangat setuju, 43 responden dengan persentase 51,9% memilih setuju, 1 responden dengan persentase 1,2% memilih kurang setuju, 8 responden dengan persentase 9,6% memilih tidak setuju, 3 responden dengan persentase 3,6% memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketrampilan komputer bagi pengelola keuangan desa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan tersebut.

b. Informasi

Informasi merupakan sarana komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat agar adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pengelola keuangan yaitu perangkat desa. informasia yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa sebagai sarana sosialisasi terkait dengan keuangan desa. pentingnya serta

perlunya pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini :

Tabel 3.21
Pemerintah Desa Memberikan Informasi Kepada Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	39	47%
Setuju	41	49,4%
Kurang Setuju	3	3,6%
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dengan pernyataan pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang akan dikelolanya keuangan desa dengan 83 responden, 39 responden dengan persentase 47% memilih sangat setuju, 41 responden dengan persentase 49,4% memilih setuju, 3 responden dengan persentase 3,6% memilih kurang setuju. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar setuju jika pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan dikelolanya keuangan desa atau dengan kata lain pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan dikelolanya keuangan desa.

Pemberian informasi kepada masyarakat bisa bersifat sosialisasi maupun melalui sistem informasi desa yang telah pemerintah daerah berikan kepada desa yang bersangkutan. Namun seringkali masyarakat belum memanfaatkan adanya sistem informasi desa. Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan data dengan kuesioner dengan pernyataan masyarakat dapat mengakses informasi tentang rincian APBDes dengan sanagat mudah mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.22
Masyarakat Dapat Mengakses Rincian APBDes

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	42	50,6%
Setuju	27	32,6%
Kurang Setuju	4	4,8%
Tidak Setuju	10	12%
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas amaka dapat diuraikan bahwa 42 responden dengan persentase 50,6% memilih sangat setuju, 27 responden dengan persentase 32,6% memilih setuju, 4 responden dengan persentase 4,8% memilih kurang setuju, 10 responden dengan persentase 125 memilih tidak setuju. Dengan demikian dapat kesimpulannya adalah sebaaian besar responden setuju dengan pernyataan masyarakat dapat mengakes informasi tentang APBDes dengan mudah.

Hal ini terlihat melalui *website* resmi disetiap desa terkecuali di desa Keningar yang belum mengelola *website* desa dengan baik. Selain dengan menggunakan *website* desa pemerintah desa juga dapat menggunakan paapn informasi sebagai wujud tranparansi APBDes maupun informasi apapun yang berkaitan dengan desa. pembuatan papan informasi ini memiliki berbagai macam tujuan agar pemerintah desa dapat menjalin komunikasi dengan masyarakatnya meskipun tidak secara langsung. Pentingnya pembuatan papan informasi yang ada di desa dapat diketahui melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Pentingnya Pembuatan Papan Informasi Desa

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	38	45,7%
Setuju	30	36,3%
Kurang Setuju	3	3,6%
Tidak Setuju	10	12%
Sangat Tidak Setuju	2	2,4%
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa 38 responden dengan persentase 45,7% memilih sangat setuju, 30 responden dengan persentase 36,3% memilih setuju, 3 responden dengan persentase 3,6% memilih kurang setuju, 10 responden dengan persentase 12% memilih tidak setuju, 2 responden dengan persentase 2,4% memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya pembuatan papan informasi di setiap sudut desa sebagai sara informasi pemerintah desa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut.

Selain dengan menggunakan papan informasi pemerintah desa juga menggunakan sistem informasi desa dengan baik sebagaimana yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. pemanfaatan sistem informasi desa di Kabupaten Magelang juga belum optimal misalnya di desa Keningar yang belum memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik. Untuk mengetahui pemerintah desa telah menggunakan sistem informasi desa dengan baik dapat dilihat dari tabel di bawah berikut ini :

Tabel 3.24
Pemerintah Desa Memanfaatkan SID dengan Baik

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	34	41,1%
Setuju	28	33,7%
Kurang Setuju	6	7,2%
Tidak Setuju	9	10,8%
Sangat Tidak Setuju	6	7,2%
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa 34 responden dengan persentase 41,1% memilih sangat setuju, 28 responden dengan persentase 33,7% memilih setuju, 6 responden dengan persentase 7,2% memilih kurang setuju, 9 responden dengan persentase 10,8% memilih tidak setuju, 6 responden lainnya dengan persentase 7,2% memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi desa telah dimanfaatkan dengan baik sebagian besar responden setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk desa Ngargomulyo dan Desa Dukun pemanfaatan sistem informasi desa telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari *website* desa yang telah dikelola dengan berbagai informasi tentang desa. namun pada desa keningar pemanfaatan sistem informasi desa belum terlihat baik bahkan dapat dikatakan sangat buruk karena *website* desa tidak sama sekali dikelola dengan baik, hal ini didasari pada kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten di bidangnya.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat untuk membangun desanya. Partisipasi masyarakat yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat juga mendukung untuk kemajuan desanya. Masyarakat dapat berpartisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Untuk mengukur apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan atau tidak bis dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.25
Masyarakat Berpartisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	43	51,9%
Setuju	34	40,9%
Kurang Setuju	3	3,6%
Tidak Setuju	3	3,6%
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa 43 responden dengan persentase 51,9% memilih sangat setuju, 34 responden dengan persentase 40,9% memilih setuju, 3 responden dengan persentase 3,6% memilih tidak setuju, dan 3 responden dengan persentase 3,6% memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian pada pernyataan masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dengan jumlah 83 responden sebagian besar menyatakan setuju jika pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakat secara luas. Namun keikutsertaan masyarakat tersebut harus juga didukung dengan kesempatan yang pemerintah desa berikan kepada masyarakat agar masyarakat secara penuh dapat mendukung dan ikut berpartisipasi

dalam pengelolaan keuangan desa. untuk melihat apakah masyarakat diberikan kesempatan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.26
Pemerintah Desa Memberikan Kesempatan Masyarakat

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	41	49,4%
Setuju	38	45,8%
Kurang Setuju	4	4,8%
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	0	0
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bahwa 41 responden dengan persentase 49,4% memilih sangat setuju, 38 responden dengan persentase 45,8% memilih setuju, 4 responden dengan persentase 4,8% memilih kurang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa sebagian responden dari tiga desa tersebut setuju jika masyarakat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Peran masyarakat memang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dimana masyarakat merupakan objek utam pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat bersama oleh masyarakat. Namun tidak serta merta masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan kepada masyarakat karena masyarakat tidak semuanya memiliki kemampuan yang cukup dalam pengelolaan keuangan desa. untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.27
Masyarakat Memiliki Kemampuan Mengelola Keuangan Desa

Kategori	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	7	8,4%
Setuju	12	14,5%
Kurang Setuju	20	24,1%
Tidak Setuju	29	34,9%
Sangat Tidak Setuju	15	18,1%
Total	83	100%

Sumber: Diolah peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan 7 responden dengan persentase 8,4% memilih sangat setuju, 12 responden dengan persentase 14,5% memilih setuju, 20 responden dengan persentase 24,1% memilih kurang setuju, 29 responden dengan persentase 34,9% memilih tidak setuju dan 15 responden dengan persentase 18,1% memilih sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa.

f. Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan korelasi person untuk mengetahui hubungan antar variabel. Untuk pengambilan kesimpulan pada korelasi person dengan melihat tingkat signifikansi atau p.

Tabel 3.28**Korelasi**

		X1	X2	X3	Y
X1	Pearson Correlation	1	,423**	,235*	,437**
	Sig. (2-tailed)		,000	,033	,000
	N	83	83	83	83
X2	Pearson Correlation	,423**	1	,222*	,398**
	Sig. (2-tailed)	,000		,044	,000
	N	83	83	83	83
X3	Pearson Correlation	,235*	,222*	1	,339**
	Sig. (2-tailed)	,033	,044		,002
	N	83	83	83	83
Y	Pearson Correlation	,437**	,398**	,339**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	
	N	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan uraian hasil analisis diatas dapat disimpulkan terdapat koefisiensi korelasi dengan nilai di bawah 0,05 yang berarti H dapat diterima dengan ketentuan nilai signifikan pada Y dibawah 0,05. Maka hasil di atas dapat dilihat nilai signifikan pada X1 (Sumber Daya Manusia) sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan dibawah 0,05 sehingga terdapat hubungan antara X1 dengan Y. Kemudian pada X2 (Informasi) terlihat nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya nilai sig dibawah 0,05 sehingga X2 memiliki hubungan atau pengaruh terhadap Y. Kemudian pada X3 nilai signifikan pada Y sebesar 0,02 yang artinya nilai signifikan masih tetap dibawah 0,05 berarti X3 (Partisipasi Masyarakat) memiliki pengaruh terhadap Y. Secara keseluruhan X1,X2 dan X3 memiliki pengaruh terhadap Y.

g. Regresi

Uji regresi digunakan sebagai alat uji pengaruh antar variabel yang digunakan penelitian. Dalam penelitian ini regresi digunakan untuk mencari pengaruh antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y dan untuk mencari pengaruh X1, X2, X3 dengan Y.

Tabel 3.29
Uji Regresi Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.			
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	17,006	3,270			5,200	,000	
	X1	,669	,245			,289	2,726	,008
	X2	,464	,216			,227	2,153	,034
	X3	,392	,174			,221	2,247	,027

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan bila nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis dapat di terima. Pada tabel tersebut nilai Sumber Daya Manusia (X1) pada nilai sig sebesar 0008 yang artinya lebih kecil dari pada 0,05 berarti sumber daya manusia berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Informasi (X2) pada nilai sig sebesar 034 yang artinya lebih kecil dari pada 0.05 sehingga dapat disimpulkan informasi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada Partisipasi Masyarakat (X3) pada tabel di atas memiliki nilai sig 027 yang artinya nilai sig lebih kecil dari 0,05 sehingga partisipasi masyarakat memiliki pengaruh pada pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan hipotesis dapat diterima atau memiliki pengaruh terhadap dependen variabel.

Kemudain untuk mengukur keberhasilan hipotesis ke empat maka dapat diukur menggunakan tabel di bawah ini

Tabel 3.30
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508,091	3	169,364	10,835	,000 ^a
	Residual	1234,873	79	15,631		
	Total	1742,964	82			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas maka dapat diuraikan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka hipotesis di terima. Dari tabel tersebut terlihat nilai sig sebesar 000 sehingga hipotesis H4 terbukti secara bersama sama memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan desa.

h. Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Tabel 3.31
Perbandingan Pengelolaan dan Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

No	Desa Ngargomulyo	Desa Keningar	Desa Dukun
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo selalu melibatkan masyarakat umum serta semua elemen yang ada di masyarakat.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo selalu melibatkan masyarakat umum serta semua elemen yang ada di masyarakat.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo selalu melibatkan masyarakat umum serta semua elemen yang ada di masyarakat, termasuk Polsek, Koramil, dan juga pihak kecamatan. Tujuannya agar semua aspirasi masyarakat dapat terjaring dengan baik.

No	Desa Ngargomulyo	Desa Keningar	Desa Dukun
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program pemerintah desa Ngargomulyo melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam pengimplementasian khususnya program pembangunan yang berupa bangunan fisik. - Pada tahun 2016 Desa Ngargomulyo memiliki Silpa Rp. 14.018.000, namun Silpa ini bukan bersumber dari Dana Desa yang harus dikembalikan jika memiliki sisa lebih. Silpa yang terjadi didasari oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa Ngargomulyo sehingga tidak dapat mengcover semua kegiatan yang dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program pemerintah desa Keningar melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam pengimplementasian khususnya program pembangunan yang berupa bangunan fisik. - Pada tahun 2016 Desa Keningar memiliki Silpa Rp. 34.528.826, namun Silpa ini bukan bersumber dari Dana Desa yang harus dikembalikan jika memiliki sisa lebih. Silpa yang terjadi di Desa Keningar karena adanya program yang tidak berjalan karena terkendala oleh waktu pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program pemerintah desa Dukun melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam pengimplementasian khususnya program pembangunan yang berupa bangunan fisik. - Pada tahun 2017 Desa Dukun memiliki Defisit Rp. 2.000.000, adanya Defisit ini karena adanya pengeluaran yang tidak terduga oleh pemerintah desa Dukun
3	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngargomulyo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bendahara desa telah melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan - Hambatan yang dialami oleh bendahara desa adalah belum memiliki kemampuan dalam pencatatan buku administrasi dan buku bank namun hal tersebut dapat di atasi dengan - 	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Keningar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bendahara desa telah melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. - Hambatan bendahara desa Keningar kurang memiliki ketrampilan yang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Keningar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bendahara desa telah melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. - Bendahara desa tidak memiliki kendala karena bendahara desa memiliki pendidikan yang cukup untuk melakukan tugas pokok dan fungsi bendahara.

No	Desa Ngargomulyo	Desa Keningar	Desa Dukun
	Pelatihan yang di adakan oleh pemerintah daerah	-	-
4	<p>Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Ngargomulyo telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah tepat waktu dalam proses pelaporannya</p> <p>Pemerintah desa Ngargomulyo telah transparansi kepada masyarakat melalui papan informasi desa dan juga wesbiste resmi desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Keningar telah sesuai dengan prosedur dan melakukan pelaporan dua kali selama satu tahun anggaran - Pelaporan dilakukan secara tepat waktu jika uang transfer dari pemerintah Dearah tepat waktu, jika transfer pemerintah daerah mengalami keterlambatan maka pelaporan keuangan juga terlambat juga. - Pemerintah desa kurang transparansi dalam melaporkan keuangan dengan tidak membuat papan informasi rincian APBDes maupun melalui wesite desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Dukun selalu tepat waktu - Pemerintah desa Dukun telah melakukan transparansi kepada masyarakat dengan melakukan pemasangan spanduk tentang rincian APBDes diberbagai tempat di Desa agar semua masyarakat mengetahui besaran penerimaan dan pengeluaran desa. - Namun kepada peneliti atau pihak luar pemerintah desa Dukun belum terbuka karena saat peneliti melakukan penelitian, peneliti tidak mendapatkan data keuangan yang penulis butuhkan secara lebih detail.
5	<p>Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ngargomulyo masih memiliki kekurangan di beberapa posisi jabatan sehingga mengakibatkan pelayanan baik administrasi maupun secara sturktural menjadi tidak maksimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa Keningar selain kurangnya perangkat desa dan juga kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa Keningar terutama dalam pengoprasionalan komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Desa Dukun sangat baik, terlebih pemerintah Desa Dukun mengutamakan perangkat yang mampu dan lebih paham terhadap IT di era modern ini.

No	Desa Ngargomulyo	Desa Keningar	Desa Dukun
6	<p>Pemerintah desa Ngargomulyo telah memberikan informasi dan sosialisasi melalui semua perasngkat maupun melalui papan informasi dalam rangka untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat yang baik</p> <p>Pemerintah desa Ngargomulyo telah memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik dan selalu aktif mengikuti pelatihan untuk mengembangkan sistem informasi desa yang lebih baik lagi</p>	<p>Pemerintah desa Keningar telah memberikan informasi apapun kepada masyarakat melalui perangkat desa sebagai penyambung lidah kepala desa</p> <p>Pemerintah desa belum memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik, hal ini dapat terlihat wesite desa yang belum memiliki konten yang berkaitan dengan desa yang bersangkutan</p>	<p>Pemerintah desa Dukun selalu memberikan informasi terupdate agar masyarakat tidak tertinggal informasi yang penting untuk mereka ketahui</p> <p>Pemerintah desa Dukun telah memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik namun hanya saja pemerintah desa Dukun tidak mencantumkan rincian APBDes di website resmi desa sehingga pihak luar tidak dapat mengetahui keuangan desa Dukun.</p>
7	<p>Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah tinggi dan sangat antusias</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah tinggi dan sangat antusias meskipun hanya kaum wanita yang mendominasi di Desa Keningar.</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah tinggi dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang pemerintah desa adakan.</p>